



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 67-01-05-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 209-01-17-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD
KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAMBI,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD
KABUPATEN/KOTA PROVINSI SULAWESI TENGAH,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD
KABUPATEN/KOTA PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

J A K A R T A

JUMAT, 3 MEI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 67-01-05-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 209-01-17-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jambi Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jambi Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jambi Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Lampung Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Lampung Tahun 2024

PEMOHON PERKARA NOMOR 67-01-05-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai NasDem

**PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024,
PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

**PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024,
PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

Partai Gerakan Indonesia Raya

**PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024,
PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, PERKARA
NOMOR 209-01-17-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

Partai Persatuan Pembangunan

PEMOHON PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Kebangkitan Bangsa

PEMOHON PERKARA NOMOR 186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Garda Republik Indonesia

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

**Jumat, 3 Mei 2024, Pukul 13.31 – 16.34 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**Siska Yosephin Sirait
Lutfie Widagdo Ediyono
Dewi Nurul Savitri
Yunita Nurwulantari
Fenny Tri Purnamasari
Mohammad Mahrus Ali**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 67-01-05-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Ferdian Sutanto
2. Bansawan

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Adithiya Diar
2. Ami Setia

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Rahmat Hidayat
2. Inggrith S. R. Luneto

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Mas Ahmad Rizaludin Sidqi
2. Fariz Salmin

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Muallim Bahar

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Iqbal Baharudin

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Wiradarma Harefa

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Gugum Ridho Putra

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 209-01-17-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Bakas Manyata

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Ahmad Fatoni
2. Muhammad Anwar Sadat

K. Pemohon Perkara Nomor 186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Zulhaidir
2. Muhlisin

L. Termohon:

Betty Epsilon Idroos

M. Kuasa Hukum Termohon

1. Hendriansyah
2. Allan Fatchan Gani Wardhana
3. Subagyo Ali Darmo
4. Taufik Hidayat
5. Hanter Oriko Siregar
6. Warsito
7. Suparmin
8. Irfan Yudha Oktara

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 67-01-05-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Bambang Wahyu Ganindra

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Raden Adidarmo Pramudji
2. Andri Alisman
3. Rudy Adiarto
4. Arif Bayu Praminto
5. Edy Sugiarto

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Rahmansyah

Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Abdul Rahman
2. Vizerd Yovan

R. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Guntur Setiawan

S. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Yodben Silitonga
2. Michael Kanta Germansa

T. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Arif Bayu Praminto
2. Edy Sugiarto

U. Bawaslu:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Herwyn J.H. Malonda | 7. Muhamad Hapis |
| 2. Iskardo P. Panggar | 8. Rofiqoh Pebrianti |
| 3. Suheri | 9. Haris Suganda |
| 4. Muh Rasyidi Bakry | 10. Ryan Aprilianto |
| 5. Nasrun | |
| 6. Wein Arifin | |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13:31 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam Perkara Penyelesaian Hasil Pemilihan Legislatif Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024, untuk Perkara 170 dan seterusnya, sampai Perkara 209, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya, tidak perlu dipanggil satu persatu, sudah tadi diabsen oleh Panitera, kita segera mulai. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu pada kesempatan siang ini. Agendanya adalah mendengarkan Permohonan Pemohon, ya. Pemohon telah menyampaikan Permohonannya dan sudah di-upload, sehingga KPU (Pihak Terkait) juga sudah mendapatkan Permohonan ini secara tertulis. Maka nanti Pemohon cukup menyampaikan highlight-nya pokok-pokok Permohonan, dan supaya lebih efisien penggunaan waktu nanti akan dipandu oleh Hakim, ya. Hal-hal yang penting yang akan dialami dalam persidangan ini, sehingga persidangan ini bisa lebih fokus, efisien untuk bisa mendapatkan hasil yang optimal, sesuai dengan ketentuan Konstitusi dan peraturan perundangan.

Oleh karena itu, nanti akan dipandu. Kemudian yang kedua, pada siang hari ini tidak ada permohonan perseorangan, semuanya Permohonan partai, dan ada Pihak Terkaitnya, ada tiga yang tidak ada Pihak Terkaitnya. Untuk Pihak Terkait sudah pada menyerahkan kuasa? Sudah semua? Sudah, ya, pada waktu Anda mendaftar sebagai Pihak Terkait, sudah diikuti dengan Surat Kuasanya masing-masing, ya, baik.

Terus kemudian bukti, ini untuk Pemohon. Bukti itu sudah harus ada pada waktu mengajukan Permohonan, tapi di dalam kesempatan ini masih dimungkinkan menambah alat bukti, menjadi alat bukti tambahan yang nanti bisa diserahkan setelah persidangan ini selesai. Nanti kita lihat ada batasan waktunya, ya, untuk tambahannya. Tapi Permohonan yang tidak ada alat buktinya dianggap tidak memenuhi syarat formil, ya, hanya sekedar menambahkan. Jadi pada awal mengajukan Permohonan, sudah harus ada apa ... ada daftar alat bukti disertai buktinya, meskipun buktinya belum lengkap tapi bisa ditambahkan sampai siang hari ini, ya.

Baik, kita mulai pada Perkara 170. Perkara 170, Permohonan disampaikan oleh partai ... diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pihak Terkaitnya NasDem, sudah ada? Siap, ya, NasDem, ya. Tolong untuk dicermati Permohonan ini supaya bisa lebih fokus pada waktu menyampaikan Keterangan Pihak Terkait, dan Termohon

menyampaikan jawabannya. Baik, kita mulai. Silakan siapa yang akan menyampaikan Permohonannya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [04:25]

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr.wb.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:30]

Waalaiikumsalam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [04:32]

Izin, Yang Mulia. Kami akan membacakan Pokok-Pokok Permohonan saja.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:37]

Ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [04:38]

Baik.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:00]

Gimana? Ya, nanti pas urutannya, dong. Sementara narik ... anu saja dulu ... sebelumnya, kalau enggak celananya ditarik dulu, kok tergesa-gesa, belum sampai urutannya. Ini Prof. Anwar kaget mau apa kira. Jangan anu ... menyela jalannya revolusi. Ayo, silakan dilanjutkan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [05:16]

Baik, terima kasih. Hal Permohonan, Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. Kepada yang terhormat,

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang bertanda tangan di bawah ini, Megawati Soekarnoputri Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan. Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada (...)

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:00]

Baik, sementara saya minta konfirmasi dulu.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [06:02]

Baik.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:03]

Mahkamah itu menerima 2 Surat Kuasa. Surat Kuasa yang pertama, nomor 269 ... 6 ... 2649, bertanggal 25 Maret. Ibu Mega dan Pak Hasto (...)

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [06:26]

Ya.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:27]

Itu memberi kuasa pada Dr. Erna, Dr. Sopar, Simeon, Abadi Hutagalung, Johannes Tobing, Elya Sitanggang, dan Michael Kanta. Terus kemudian ada Surat Kuasa lagi, bertanggal 23 Maret. Ini ada sekitar 31 kuasa. Yang dipakai yang mana ini?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [06:58]

Baik, Yang Mulia. Kami pakai yang ... yang lengkap yang 38 orang, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:02]

Yang banyak, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [07:03]

Ya.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:04]

Oke, jadi yang sedikit yang ini dianggap tidak ada?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [07:08]

Ya, betul, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:09]

Yang dipakai yang lengkap.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [07:10]

Betul.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:10]

31 kuasa?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [07:11]

Betul, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:12]

Oke, meskipun yang hadir berapa ini di sini? Untuk semua perkara di ... anu ... toh? Panel 1, 2, 3 kan ini (...)

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [07:20]

Ya, betul (...)

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:20]

Berlaku kan?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [07:21]

Betul, betul.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:21]

Oke, terima kasih. Ini enggak berlaku, ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [07:23]

Ini enggak berlaku, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:24]

Oke.

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [07:26]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami melanjutkan.
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada (...)

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:31]

Terus, sebentar, sebentar.

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [07:33]

Oke, baik.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:38]

Nah, itu yang 8 orang yang Surat Kuasa pertama di 41 (...)

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [07:42]

Ada di dalam 41, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:44]

Itu tidak tanda tangan tapi, belum tanda tangan? Yang Dr ... Dr. Sophar dan Karto Nainggolan, 8 orangnya belum tanda tangan. Atau itu dianggap berlaku dua-duanya? Kalau belum, nanti siang di ... anu ... sore nanti ditambahi tanda tangannya.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [08:06]

Baik, kami nanti untuk tanda tangan, kami untuk upayakan untuk bisa melengkapi tanda tangan, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:10]

Oke, gitu, ya. Jadi yang berlaku yang 41 itu, tapi 8 orang tanda tangannya disusulkan?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [08:18]

Ya, betul.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:19]

Oke. Baik, silakan teruskan.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [08:22]

Baik. Kami lanjutkan, Yang Mulia. Memberikan kepada ... kuasanya kepada Yanuar Wasesa, S.H., M.Si, M.H., dalam Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Mengajukan Permohonan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 (...)

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:45]

Ya, itu dianggap dibacakan.

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [08:46]

Baik, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:48]

Ya. Objek (...)

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [08:49]

Selanjutnya, Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:51]

Objeknya apa dulu? Apa itu? Perihal itu? Objeknya itu apa itu?

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [08:58]

Ya, tadi kami sudah (...)

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:59]

Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 360/2024.

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [09:03]

Betul.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:04]

Ya, itu, ya.

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [09:05]

Ya, tadi kami sudah membacakannya.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:06]

Ya, Kewenangan?

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [09:08]

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (...)

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:12]

Berwenang?

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [09:13]

Mahkamah Konstitusi berwenang.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:14]

Oke, Tenggang Waktunya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [09:16]

Waktunya masih dalam waktu yang sudah ditentukan, Yang Mulia (...)

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:17]

Masih dalam tenggang waktu. Kapan mengajukannya?

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [09:22]

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan penyelesaian hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi, pada hari Sabtu tanggal 23 Maret, pukul 21.15 WIB, Yang Mulia.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:35]

Betul. Kemudian (ucapan tidak terdengar jelas) legal standing. Karena di situ diajukan oleh partai politik nomor urut berapa itu, belum ada itu, kosong masih itu? Pemohon adalah salah satu partai politik peserta pemilu, nomor urut berapa?

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [09:54]

Nomor Urut 3, Yang Mulia.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:55]

3. Ditambahkan ya.

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [09:56]

Baik.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:57]

Direnvoi kecil, boleh. Terus sekarang Pokok Permohonannya. Yang pertama, dipersengketakan di mana?

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [10:07]

Baik, dalam Pokok Permohonan yang kami ajukan ada dua, Yang Mulia.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:10]

Satu?

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [10:11]

Yang satu adalah di DPRD Kota Palu.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:12]

Kota Palu.

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [10:13]

Dapil Kota Palu 4.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:15]

Oke.

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [10:16]

Yang kedua (...)

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:19]

He em.

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [10:20]

Di DPRD Kabupaten Donggala.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:22]

Donggala.

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [10:23]

Dapil Kabupaten Donggala 4.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:24]

Baik. Sekarang yang Dapil Kota Palu 4 dulu.

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [10:28]

Kota Palu dulu.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:29]

Apa ... ada persoalan apa?

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [10:30]

Baik. Kami langsung bacakan dari poin nomor 4, Yang Mulia.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:41]

Ya, persoalan apa?

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [10:43]

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, berlangsung pemungutan suara di TPS 08 Desa Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu. Pada proses pemungutan suara berlangsung, tepatnya pada pukul 12.00 WITA, Saudari Siti Masyitah selaku Warga Negara Indonesia (WNI) yang juga terdaftar sebagai daftar pemilih di TPS tersebut (Bukti P-4), Yang Mulia, ingin menggunakan hak pilihnya. Diketahui juga Saudari Siti Masyita, tidak mendapat C.Pemberitahuan-KPU atau pemberitahuan untuk memilih. Namun demikian Saudara Siti Masyita tetap datang ke TPS 08, Kelurahan Donggala, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu dengan membawa KTP Elektronik. Akan tetapi Ketua KPPS-nya, hanya memberikan satu jenis surat suara kepada Saudara Siti Masyita, yaitu surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Yang seharusnya Saudara Siti Masyita, berhak mendapatkan lima jenis surat suara untuk setiap jenis pemilihan Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:51]

Tidak diberi (...)

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [11:52]

Tidak diberikan.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:54]

Kartu suara untuk pemilihan legislatif, ya?

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [11:57]

Ya, hanya diberikan satu suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:01]

Ya. Kemudian apalagi?

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [12:03]

Nomor 5. Selanjutnya pada waktu yang bersamaan, ada dua orang pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya di TPS 08, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu atas nama Saudari Endang, berdomisili atau ber-KTP di Kabupaten Sigi dan Saudara Aulia Intan Ramadani, berdomisili atau ber-KTP di Kabupaten Toli-Toli. Yang tidak terdaftar dalam DPT maupun daftar pemilih tambahan (DPTb), karena tidak membawa model A.Pindah memilih, namun demikian KPPS mempersilakan Saudara Endang dan Saudara Aulia Intan Ramadani menggunakan hak pilihnya di TPS 08 kecamatan ... Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu. Yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut (...)

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:51]

Ada, 2 orang, ya?

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [12:53]

Ada, 2 orang.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:54]

Oke. Bisa disingkat saja?

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [12:57]

Baik.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:57]

Apa itu (...)

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [12:58]

Bahwa atas kejadian TPS 08, Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, pada saat rekaptulasi tingkat kabupaten telah diajukan keberatan oleh saksi rekapitulasi. Dari Pemohon, Yang Mulia (...)

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:10]

Oke.

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [13:10]

Dituangkan dalam model D.Kejadian Khusus.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:13]

Oke.

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [13:13]

Ada Bukti P-5.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:14]

Ada Bukti P-5, ya? Yang tadi, itu yang angka 2 tadi ada buktinya?

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [13:19]

Ada, kami lampirkan, Yang Mulia, bukti.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:22]

Yang 2 orang pemilih, bukti berapa itu? Karena, Saudara, semuanya memakai bukti sehingga kita bisa langsung kapan ngecek ini. Enggak ada buktinya?

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [13:37]

Ada surat pernyataan, Yang Mulia.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:39]

Surat pernyataan dari siapa?

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [13:40]

Dari (...)

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:43]

Saksi?

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [13:44]

Bukan (...)

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:44]

Bukan?

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [13:44]

Bukan, yang bersangkutan, Yang Mulia.

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:45]

Yang bersangkutan itu Endang dan Aulia itu?

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [13:48]

Ya, betul.

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:50]

Pernyataannya di mana?

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [13:53]

Kami cek dulu bukti, daftar buktinya, Yang Mulia.
Di P-7, Yang Mulia.

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:05]

P-7?

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [14:08]

Sama P-8, pernyataan dari Endang dan Siti Masyitah.

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:10]

Oke, P-7 dan P-8. Sekarang Nomor 4. Pelapor Ahmad Alaydrus.

114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [14:19]

Sebentar, Yang Mulia.

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:23]

Yang Bukti P-6 itu?

116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [14:26]

P6?

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:27]

Ya. Apa itu? Bukti P-6 itu menjelaskan apa?

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [14:31]

Bahwa, Pemohon menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu kepada Bawaslu, Yang Mulia.

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:35]

Ya.

120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [14:36]

Jadi, Buktinya P-6 (...)

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:37]

Oke.

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [14:38]

Jadi, sudah ada laporan juga ke Bawaslu.

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:40]

Tapi belum direspons?

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [14:40]

Ya.

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:42]

Atau belum ditindaklanjuti?

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [14:42]

Betul.

127. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:43]

Oke. Terus berikutnya? KPPS TPS 08, Donggala Kodi. Bukti P-7, P-8 itu Endang, itu?

128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [14:56]

Bahwa dugaan pelanggaran itu di KPPS 08 dibuktikan dengan surat pernyataan itu yang ada (...)

129. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:02]

Ya.

130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [15:03]

P-7 dan P-8, Yang Mulia (...)

131. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:04]

P-7 dan P-8. Oke (...)

132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [15:04]

Ya.

133. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:04]

Terus berikutnya.

134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [15:09]

Ya.

135. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:11]

Ini statement melanggar asas (...)

136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [15:11]

Statement melanggar undang-undang, Yang Mulia.

137. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:12]

Ya.

138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [15:14]

Bahwa lebih lanjut, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang dan seterusnya (...)

139. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:18]

Atas kejadian-kejadian itu, maka perolehan suaranya gimana? Tidak ada?

140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [15:24]

Perolehan suaranya (...)

141. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:27]

Ini tidak mempersoalkan angka-angka, ya?

142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [15:29]

Ya, Yang Mulia.

143. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:31]

Oke, sekarang pindah ke Dapil (...)

144. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [15:34]

Donggala (...)

145. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:35]

Donggala 4. Gimana Donggala 4 ini?

146. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [15:37]

Di Donggala 4.

147. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:39]

Ini ada persandingan suaranya?

148. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [15:43]

Ya, ada persandingan suara, ada suara yang kami bacakan, Yang Mulia.

149. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:47]

Ya. Silakan.

150. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [15:48]

Bahwa Pemohon merupakan peserta pemilih ... pemile ... Pemilihan Umum 2024 sebagai ditetapkan dalam ... oleh Termohon. Selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

151. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:59]

Ya.

152. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:00]

Ini angkanya disebut saja.

153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [16:01]

Bahwa perolehan suara Pemohon dan Partai NasDem untuk Kabupaten Donggala Dapil 4 memiliki selisih 1 suara.

154. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:06]

1 suara.

155. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [16:07]

Dimana seharusnya Pemohon lebih unggul 1 suara.

156. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:10]

Oke.

157. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [16:11]

Sebagaimana tabel di bawah ini.

158. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:14]

Keunggulannya mestinya di PDIP.

159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [16:16]

Keunggulan harusnya di Pemohon di PDI Perjuangan, Yang Mulia.

160. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:17]

Oke. Kenapa kok bisa di NasDem malah suaranya?

161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [16:22]

Ya. Penetapan suara oleh Termohon tersebut tidak berdasar atau keliru karena Partai NasDem mendapatkan penambahan suara di TPS 05.

162. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:29]

05.

163. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [16:30]

Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, tanpa dapat dipertanggungjawabkan oleh Termohon, Yang Mulia.

164. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:38]

Oke.

165. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [16:39]

Bahwa, jika tidak ada penambahan suara bagi Partai NasDem tersebut, maka kursi ketujuh untuk pengisian DPRD Kabupaten Donggala Dapil 4 adalah untuk menjadi milik Pemohon.

166. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:47]

Oke.

167. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [16:48]

Dikarenakan perolehan suara menurut Termohon sejumlah 7.257. Jika dibagi 3 dengan menggunakan metode sainte laque adalah sebesar 2.419 jumlah yang sama dengan perolehan suara Pemohon.

168. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:05]

Sedangkan PDIP=2.419?

169. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [17:09]

Ya. Betul.

170. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:10]

Oke. Ya, apa lagi dalilnya?

171. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [17:16]

Bahwa Pemohon keberatan terhadap Hasil Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 dan seterusnya, Yang Mulia.

172. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:23]

Oke.

173. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [17:24]

Bahwa Pemohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada Daerah Pemilihan Donggala 4, khususnya di TPS 05, Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, yang dimohonkan adalah sebagai berikut.

Terjadi penggelembungan suara untuk Partai NasDem berdasarkan sandingan antara C.Hasil DPRD kabupaten/kota dan D.Hasil Kecamatan DPRD kabupaten/kota, TPS 05 Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah pada model C.Hasil DPRD kabupaten/kota di TPS 05 Kelurahan atau Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Bersebagaimana yang ada di tabel, Yang Mulia.

174. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:06]

Oke. Ya.

Sekarang tinggal petitumnya toh berarti?

175. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [18:10]

Ya.

176. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:11]

Ya. Silakan (...)

177. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [18:12]

Selebihnya untuk.

178. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:13]

Petitumnya.

179. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [18:14]

Aturan yang dilanggar, Yang Mulia.

180. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:15]

Ya.

181. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [18:16]

Langsung kepada Petitem, Yang Mulia?

182. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:18]

Silakan.

183. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [18:19]

Baik. Berdasarkan seluruh uraian, sebagaimana tersebut di atas Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota Secara Nasional dalam Pemilu (Pemilihan Umum) Tahun 2024, pukul 22.19 WIB, tanggal 20 Maret 2022[sic!], sepanjang untuk pemilihan anggota DPD Kota Palu, Daerah Pemilihan Kota Palu 4.

184. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:58]

Ini yang dapil satunya, ya?

185. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [19:00]

Ya. Dapil satunya.

186. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:01]

Sekarang yang ketiga, dapil berikutnya, Donggala?

187. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [19:04]

Dapil ... ya. Betul, Yang Mulia.

188. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:05]

Ya.

189. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [19:06]

Membatalkan juga sama.

190. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:07]

Sama.

191. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [19:08]

Ini yang poin 4 adalah kami ada renvoi, Yang Mulia. Kesalahan penulisan kecamatan.

192. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:13]

Wah, itu. Apa ini kecamatannya apa? Kecamatan Tatanga, Kota Palu?

193. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [19:20]

Yang kami tertulis di sini adalah, Kelurahan Ulujadi, yang seharusnya Donggala Kodi.

194. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:26]

Oke.

195. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [19:28]

Sesuai dengan Permohonan dari atas tadi, Yang Mulia.

196. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:32]

Donggala Kodi.

197. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [19:33]

Ya, Kecamatan nya Ulujadi.

198. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:35]

Jadi, dpositanya mengatakan Donggala Kodi (...)

199. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [19:37]

Ya.

200. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:38]

Tapi di Petitem ini tertulis apa?

201. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [19:40]

Kelurahan Ulujadi, tadi kebalik, Yang Mulia.

202. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:42]

Oke, Ulujadi, kelurahannya.

203. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [19:44]

Ya.

204. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:45]

Ya. Sekarang disesuaikan dengan positanya.

205. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [19:48]

Ya. Kami ganti dengan se (...)

206. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:50]

Donggala Kodi.

207. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [19:51]

Kami bacakan seluruhnya, Yang Mulia.

208. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:52]

Ya.

209. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [19:53]

Poin 4. Bahwa dengan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh KPPS di TPS 08, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, maka Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 08, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu.

Kelima. Menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Donggala Tahun 2024 Daerah Pemilihan Kabupaten Donggala 4 yang benar adalah Nomor Urut 3 PD ... Partai Politik PDI Perjuangan, perolehan suara Termohon ... berdasarkan menurut Pemohon adalah 2.419. Pemohon=200 ... 2.419. NasDem=7.257. Berdasarkan versi Pemohon adalah 7.256.

210. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:52]

Ini yang benar, ya?

211. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [20:53]

Ya, betul, Yang Mulia.

212. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:55]

Oke. Terus (...)

213. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [20:55]

Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Donggala di Daerah Pemilihan Donggala 4 sebagai berikut.

Izin, Yang Mulia. Kami membacakan tabelnya?

214. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:08]

Ya, dianggap dibacakan. Angkanya saja (...)

215. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [21:09]

Baik, tabelnya sebagaimana tertara dalam Permohonan ini, Yang Mulia.

216. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:13]

Angkanya saja, angkanya.

217. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [21:14]

Angkanya?

218. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:17]

PDIP menurut C berapa, D berapa, itu dibaca.

219. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [21:22]

Kabupaten Donggala ini menjadi dari semula PDI Perjuangan=1.437.

220. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:33]

Semuanya tetap, enggak berubah ini.

221. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [21:34]

Tetap, kalau untuk PDI Perjuangan tetap, Yang Mulia.

222. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:36]

Ya, kalau untuk NasDem yang berubah.

223. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [21:38]

Yang berubah.

224. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:39]

Dibaca, untuk NasDem.

225. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [21:40]

Yang menjadi PDI Perjuangan=1.437, NasDem=5.012 suara.

226. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:51]

Oke.

227. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [21:52]

Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konsistusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, ditandatangani.

Terima kasih, Yang Mulia.

228. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:02]

Itu ada petitum ketujuh itu apa itu? Dibaca juga dong. Memerintah (...)

229. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [22:08]

Ketujuh, memerintahkan kepada Termohon, Yang Mulia.

230. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:10]

Yang lengkap, kalau Petitum dibaca lengkap.

231. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [22:13]

Baik, kami tadi sudah bacakan.

Tujuh. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konsistusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

232. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:24]

Oke.

233. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [22:25]

Terima kasih, Kuasa Hukum ditandatangani.

234. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:28]

Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup, ya?

235. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [22:31]

Cukup, Yang Mulia. Itu tadi yang kami minta direnvoi saja.

236. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:33]

Ya, Prof. Enny, ada? Silakan, Yang Mulia.

237. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:40]

Ini yang bermasalah itu di kecamatan mana saja ini? Kecamatan Ulujadi, ya?

238. 235. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA: WIRADARMA HAREFA [22:49]

Ya, yang untuk di (...)

239. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:50]

Kecamatan Ulujadi dan kemudian Kecamatan Dampas. Yang satunya di Dampas, ya?

240. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [22:57]

Di Dampas yang untuk Donggala, Yang Mulia.

241. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:58]

Jadi ada 2 ... ada 2 kecamatan di Dapil Donggala 4. Ada berapa ... berapa kecamatan dalam ... dalam Dapil Donggala 4, itu?

242. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [23:05]

Waduh.

243. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:06]

Kok, jangan waduh. Mesti kan tahu toh di Dapil Donggala 4 ada berapa kecamatan. Yang Anda persoalkan itu ada 2 kecamatan saja.

244. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [23:14]

Hanya 1 kecamatan saja, Yang Mulia.

245. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:15]

1 kecamatan saja?

246. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [23:17]

Ya.

247. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:17]

Yang Kecamatan Ulujadi?

248. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [23:19]

Yang di TPS 0 (...)

249. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:20]

Enggak jadi itu, Kecamatan Ulujadi.

250. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [23:22]

Ulujadi itu di TPS-nya 05, Yang Mulia.

251. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:25]

Oh, bukan di dapil sama juga? Di dapil itu juga? Dapil 4?

252. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [23:29]

Beda kabupaten, Yang Mulia.

253. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:31]

Kabupatennya beda?

254. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [23:32]

Kabupaten itu yang satu adalah Kota, Kota Palu, yang (...)

255. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:35]

Kota Palu, yang (...)

256. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [23:35]

Satu Donggala (...)

257. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:36]

Yang satu Donggala (...)

258. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [23:36]

Kabupaten Donggala.

259. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:37]

Yang Donggala itu berarti hanya di (...)

260. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [23:39]

TPS-08.

261. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:40]

Kecamatan Dampelas, ya?

262. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [23:41]

Ya.

263. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:42]

Kecamatan Dampelas. Yang jadi, Saudara, minta ini adalah di Kabupaten Donggala 4, itu kecamatannya Dampelas, ya?

264. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [23:54]

Ya.

265. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:54]

Yang satunya kota, ya?

266. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [23:55]

Kota.

267. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [23:56]

Yang ini Anda minta pembatalan Keputusan KPU (...)

268. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [23:59]

Ya.

269. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [24:00]

Itu untuk Kabupaten Donggala 4 saja?

270. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [24:03]

Dua-duanya kami minta, Yang Mulia.

271. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [24:05]

Dua-dua ... sepanjang Kabupaten Donggala 4 ini?

272. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [24:10]

Ya, karena di situ (...)

273. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [24:10]

Yang Petitem 3 itu, lho. Coba Petitem 3-nya sepanjang ... ya.
Petitem yang satunya, ada Petitem 2, ya? Oh, Yang 2 di Dapil Kota Palu, yang satunya di (...)

274. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [24:24]

Donggala 4 (...)

275. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [24:25]

Donggala 4 (...)

276. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:25]

Donggala 4 (...)

277. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [24:25]

Ya.

278. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH[24:26]

Yang satu sudah diperbaiki.

279. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [24:27]

Ya.

280. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [24:28]

Kemudian yang semula ini ... menjadi semula ini ... yang ini, ya, yang tertulis dari bukti yang mana nih, ya, yang di Petitem Saudara. Semula ada 513, kemudian menjadi 512.

281. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [24:41]

Ya.

282. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [24:42]

Itu buktinya apa itu? Yang bukti, yang satu suara saja itu, ya?

283. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [24:53]

Kami lapor, hasil C.Hasil, Yang Mulia. Salinan DPT Kabupaten 05 itu, kami lampirkan Buktinya di P-6.

284. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:03]

Ya. Ini sudah dilaporkan ke Bawaslu semua?

285. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [25:06]

Ada laporannya, Yang Mulia.

286. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:07]

Ada laporannya. Tindak lanjutnya ada?

287. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [25:10]

Tidak ada kami terima, Yang Mulia.

288. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:13]

Tidak ada tindak lanjutnya?

289. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [25:13]

Ya.

290. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:14]

Ya, ini tolong nanti Bawaslu, KPU, ya. Dilengkapi, mulai dari DPT-nya, suara sah, suara tidak sah, DPK, DPTb-nya semua itu lengkapi, supaya kita bisa lihat secara terang nanti bagaimana satu suara yang dinyatakan berselisih itu, termasuk yang pemilih pindahan itu, ya.

Itu saja, Pak Ketua.

291. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:36]

Baik. Terima Kasih, Yang Mulia Prof. Anwar. Cukup? Baik. Sudah selesai, ya, Pemohon 170 sekarang buktinya.

Ya, itu Petugas, ada KPU dari Sulteng, katanya mau masuk. Ya, lain kali tidak boleh terlambat, ya. Itu tempatnya lain itu, kamarnya siapa? Istri oranguduknya di situ. Ya, KPU itu. KPU itu di sini, ya. Jangan menggunakan hak orang lain. Ya, lain kali enggak boleh terlambat, ya? Itu di Negara Konoha yang terlambat gitu, ditembak mati itu.

Baik, Pemohon Perkara 170. Untuk Dapil Kota Palu, mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-8, betul?

292. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [25:53]

Betul, Yang Mulia.

293. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:55]

Untuk Donggala juga P-1 sampai dengan P-8, betul?

294. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [25:58]

Ya.

295. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:00]

P-9 dimuat di Posita tapi tidak ada bukti fisiknya itu, ya. Jadi ada yang di bukti di Posita tapi P-9-nya ternyata tidak ada buktinya. Yang disahkan hanya Dapil Kota Palu P-1 sampai P-8, Dapil Kota Donggala 4, P-1 sampai dengan P-8, dua-duanya disahkan.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang akan disampaikan, Pemohon?

296. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: WIRADARMA HAREFA [26:30]

Untuk Pemohon cukup, Yang Mulia.

297. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:32]

Cukup, ya. Terima kasih, ya.

Berikutnya sekarang Perkara 166, diajukan Partai Kebangkitan Bangsa, siap?

298. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [25:45]

Hadir, Yang Mulia.

299. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:50]

Oke. Pihak terkaitnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan? Oke. Siap, ya. Silakan dibaca.

300. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [26:55]

Baik. Terimakasih, Yang Mulia. Izin membacakan.

301. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:57]

Oke. Tunggu sebentar.

302. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [26:59]

Pada terhormat Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Dr. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si, dan M. Hasanuddin Wahid bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Utara.

Izin, Yang Mulia, untuk membacakan kewenangan-kewenangan bagian depannya.

303. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:34]

Ya, silakan.

304. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [28:34]

Yang pertama, Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana terlampir pada halaman 2.

305. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:39]

Berwenang, ya?

306. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [28:40]

Berwenang, Yang Mulia.

307. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:41]

Oke.

308. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [28:42]

Kemudian, Kedudukan Hukum Pemohon. Berwenang sebagai partai politik beserta pemilu.

309. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:46]

Ya. Tenggang Waktunya?

310. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [28:49]

Tenggang Waktunya masih dalam batas waktu yang diajukan, Yang Mulia.

311. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:53]

Diajukan kapan, toh?

312. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [28:54]

23 Maret, Yang Mulia.

313. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:56]

Sabtu, 23 Maret, pukul berapa?

314. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [28:58]

Pukul 07.00 WIB, Yang Mulia.

315. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:01]

Eh, 21.17 WIB di sini. Ini 21.17 WIB. Ya? 21.17 WIB (...)

316. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [29:12]

Ya, Yang Mulia.

317. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:12]

Masih tenggang waktu. Kedudukan Hukum diajukan oleh partai politik, nomor urut berapa?

318. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [29:20]

Nomor Urut 1, Yang Mulia.

319. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:21]

Nomor Urut 1. Ini tidak tertulis, kalau renvoi yang kayak gini ini boleh. Karena partainya sudah betul, nama partai. Terus, yang dipersoalkan di mana?

320. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [29:33]

Perselisihan pencatatan suara, Yang Mulia. Izin, membacakan pokok permohonan, Yang Mulia.

321. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:38]

Eenggak usah dibacakan, yang singkat saja.

322. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [29:41]

Ya, baik, Yang Mulia. Poin-poin.

323. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:43]

Ya.

324. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [29:45]

Bahwa, berdasarkan sua ... perolehan suara Termohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan suara Pemohon serta perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten ... Kabupaten Daerah Pemilihan Sigi 5, Provinsi Sulawesi Tengah.

325. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:00]

Sulawesi Tengah.

326. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [30:01]

Ya. Pengurangan suara Pemohon di Desa Baliase, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, TPS 3 (...)

327. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:09]

TPS berapa? TPS 3?

328. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [30:10]

TPS 3, Yang Mulia.

329. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:12]

TPS 3.

330. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [30:14]

Yang sebelumnya 20 suara menjadi 19 suara.

331. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:17]

Hanya satu suara, ya?

332. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [30:18]

Ya, Yang Mulia.

333. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:19]

Oke. Terus?

334. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [30:19]

Pengurangan suara tersebut karena adanya kesalahan administrasi input dari data PPK Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi.

335. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:26]

Oke.

336. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [30:26]

Sebagaimana dalam Bukti P-3, P-4, dan Bukti P-5, Yang Mulia.

337. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:31]

Ya.

338. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [30:32]

Kemudian poin dua adalah penambahan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Sebelumnya perolehan suara sebanyak 20 suara menjadi 29 suara di Desa Uwemanje, Kecamatan (...)

339. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:43]

Jadi, yang punya PKB dikurangi satu suara, yang PDI ditambah satu suara ini?

340. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [30:51]

Enggak ada penambahan.

341. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:52]

Penambahan satu suara?

342. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [30:53]

Sembilan, Yang Mulia.

343. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:54]

Oh, sembilan malah.

344. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [30:55]

Ya.

345. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:55]

20 suara menjadi 29 suara?

346. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [30:59]

Ya, benar.

347. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:59]

Oke.

348. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [30:59]

Penambahan suara tersebut karena adanya kesalahan administrasi input data dari PPK Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi.

349. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:07]

Oke. Terutama di TPS 5-nya?

350. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [31:10]

Ya benar, Yang Mulia.

351. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:11]

Ya. Terus?

352. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [31:13]

Sebagai mana terlampir Bukti P-6, P-7, dan P-8, Yang Mulia.

353. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:17]

Ya. Terus yang lain? Apa? Satunya TPS 3.

354. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [31:25]

Untuk TPS cukup dua yang bermasalah (...)

355. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:26]

Cukup dua, ya?

356. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [31:27]

Ya.

357. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:27]

Ya. Oke.

358. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [31:28]

Izin untuk melanjutkan kepada Petitem, Yang Mulia.

359. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:31]

Ya. Silakan.

360. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [31:32]

Berdasarkan seluruh uraian sebagai yang tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya, sepanjang pemilihan Dapil 5 Sigi, Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah untuk pengisian calon Anggota DPRD Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.

361. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:59]

Oke.

362. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [32:00]

Tiga. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk perolehan alokasi kursi partai politik peserta pemilu anggota DPR-DPRD Provinsi kabupaten di Daerah Pemilihan Sigi 5, Kecamatan Marawola, Kecamatan Marawola Barat, dan Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, sebagai berikut. Dalam tabel tertulis (...)

363. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:28]

Ya.

364. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [32:27]

Yang Mulia.

365. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:28]

Ya, silakan, dibaca.

366. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [32:30]

Partai Kebangkitan Bangsa sejumlah 2.190 suara.

367. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:33]

Oke.

368. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [32:34]

Kemudian, Partai Demokrasi Indonesia sejumlah 2.181 suara.

369. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:38]

Ini, untuk kursi yang ke berapa sih?

370. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [32:40]

Kursi terakhir (...)

371. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:42]

Terakhir.

372. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [32:42]

Yang kursi keenam, Yang Mulia.

373. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:43]

Keenam, Kursi keenam. Kalau selisihnya begini, jadi begini yang dapat yang keenam Partai Kebangkitan Bangsa, ya?

374. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [32:50]

Benar, Yang Mulia.

375. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:51]

Kalau masih sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon, maka kursi itu diperoleh PDIP?

376. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [32:58]

Benar, Yang Mulia.

377. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:59]

Oke, ini yang diminta, berarti ada pergeseran 9 suara, ini?

378. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [33:03]

9 suara, Yang Mulia.

379. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:04]

Oke. Ada lagi yang akan disampaikan?

380. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [33:07]

Demikian, cukup, Yang Mulia.

381. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:08]

Cukup, baik. Prof. Enny, ada? Silakan, Prof.

382. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [33:14]

Saudara Kuasa Pemohon. Ini perolehan suara masing-masing Parpol di TPS 3 dan TPS 5 ada Saudara, buktinya? Perolehan suaranya masing-masing?

383. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [33:25]

Di Bukti P-3, P-4, dan P-5, Yang Mulia.

384. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [33:27]

Itu bukti apa itu?

385. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [33:29]

Di C.Hasil (...)

386. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [33:29]

Persandingan masing-masing itu, lho?

387. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [33:03]

Ya (...)

388. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [33:32]

Perolehan suaranya?

389. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [33:33]

Ini hanya (...)

390. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [33:34]

Ada?

391. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [33:34]

Melampirkan C.Hasil dan C.Salinan, Yang Mulia.

392. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [33:36]

Jadi enggak ... enggak ada persandingannya, Saudara?

393. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [33:38]

Enggak.

394. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [33:39]

Kenapa kok sampai ada yang 20? Yang apa namanya, sebelumnya 20 menjadi 19 suara begitu, terus yang di TPS 5 juga. Itu tidak ada persandingannya masing-masing, ya. Perolehan suaranya?

395. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [33:49]

Ya, tidak, Yang Mulia.

396. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [33:51]

Tidak ada. Ini yang Saudara sampaikan, buktinya Bukti C.Hasil, ya?

397. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [33:56]

C.Hasil dan (...)

398. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [33:57]

D.Hasil juga ada?

399. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [33:58]

C.Salinan, Yang Mulia. Ya, P-3 dan P-4.

400. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [34:00]

C.Hasil dan D.Hasil. Oke, itu saja, Pak.

401. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:04]

Oke, terima kasih, Yang Mulia. Prof. Anwar, cukup? Baik. Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-11, betul?.

402. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [34:17]

Benar, Yang Mulia.

403. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:19]

Ya, sudah diverifikasi, lengkap, disahkan.

KETUK PALU 1X

404. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [34:23]

Terima kasih, Yang Mulia.

405. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:23]

Terima kasih.
Berikutnya, Perkara 173, Partai Persatuan Pembangunan.

406. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUGUM RIDHO PUTRA [34:38]

Terima kasih, Yang Mulia.

407. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:40]

Ya, sebentar saya ngambil ... anunya ... biar bisa ngikuti. Oke, silakan.

408. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUGUM RIDHO PUTRA [34:49]

Yang Mulia, Majelis Panel 3, Para Pemohon, Para Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu. Assalamualaikum wr. wb.

409. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:57]

Walaikumsalam.

410. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUGUM RIDHO PUTRA [35:01]

Pemohon Perkara 173, Partai PPP. Dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya dianggap dibacakan, sepanjang hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tengah untuk konversi PT 4%.

Perkenalkan saya sendiri, Gugum Ridho Putra, Kuasa Hukum dari H. Muhamad Mardiono dan Haji Arwani Thomafi, Ketua Umum dan Sekjen Partai Persatuan Pembangunan.

411. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:40]

Ya.

412. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUGUM RIDHO PUTRA [35:41]

Untuk Kewenangan (...)

413. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:44]

Kewenangan ada, ya?

414. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUGUM RIDHO PUTRA [35:45]

Mahkamah, ya, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

415. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:46]

Ya, terus kemudian (...)

416. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUGUM RIDHO PUTRA [35:47]

Terus, kemudian (...)

417. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:48]

Tenggang Waktu ada, masih dalam tenggang waktu.

418. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUGUM RIDHO PUTRA [35:51]

Ya, Tenggang Waktu Permohonan kami ajukan hari Rabu tanggal 20 Maret 2024. Mohon izin, Yang Mulia. Hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 (...)

419. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:00]

Pukul 19.51 WIB.

420. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUGUM RIDHO PUTRA [36:00]

19.51.

421. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:01]

Ya.

422. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUGUM RIDHO PUTRA [36:02]

Selanjutnya pokok (...)

423. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:03]

Diajukan Partai.

424. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUGUM RIDHO PUTRA [36:04]

Ya.

425. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:06]

Nomor Urut 17.

426. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUGUM RIDHO PUTRA [36:07]

Ya, Yang Mulia.

427. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:08]

Ya, memiliki kedudukan hukum. Sekarang di Posita apa yang dipersoalkan?

428. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUGUM RIDHO PUTRA [36:12]

Baik, Yang Mulia. Jadi dalam Permohonan ini, sama dengan Permohonan-Permohonan yang diajukan oleh Partai PPP. Mengajukan adanya praktik pemindahan suara Pemohon untuk pemilu anggota DPR pada daerah pemilihan Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tengah secara tidak sah kepada Partai Garuda. Sebagaimana pada poin 14 halaman 5, kami uraikan bahwa Partai PPP memperoleh suara sebesar 5.878.777 suara atau 3.87%. Dalam hal ini, Partai PPP terdapat selisih kekurangan sebesar 0.13% atau setara dengan angka 193.088 suara.

Bahwa persandingan perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda terdapat perbedaan antara versi penghitungan Termohon dengan versi Pemohon khususnya pada 35 dapil tersebar di 19 provinsi, salah satunya adalah Sula ... Provinsi Sulawesi Tengah. Pada Dapil Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut.

Tabel 2, persandingan perolehan suara (...)

429. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:24]

Tadi berapa dapil seluruh Indonesia?

430. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUGUM RIDHO PUTRA [37:26]

35, Yang Mulia.

431. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:27]

35. Ini yang salah satunya di Sulawesi Tengah?

432. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUGUM RIDHO PUTRA [37:31]

Salah satunya di Sulawesi Tengah.

433. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:32]

Oke.

434. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUGUM RIDHO PUTRA [37:33]

Tabel terlampir, Yang Mulia.

Bahwa pada Dapil Sulawesi Tengah di atas terjadi perpindahan suara Pemohon, Partai PPP kepada Partai Garuda sebanyak 5.958 suara. Diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan suara Partai Garuda yang semula 136 suara, bertambah secara tidak sah menjadi 6.094 suara.

Oleh karenanya perolehan suara Pemohon yang semula 34.304 suara, berkurang secara tidak sah menjadi 28.346 suara. Perpindahan suara Pemohon tersebut berlanjut hingga rekapitulasi di atasnya hingga tingkat nasional, sebagaimana dituangkan oleh Termohon dalam keputusan objek sengketa dalam Permohonan ini.

Selanjutnya untuk bagian Petitum, Yang Mulia.

435. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:23]

Ya, itu ... anunya ... berapa dulu? Yang dipersengketakan Partai Garuda dan P3 berapa dari Sulteng ini?

436. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUGUM RIDHO PUTRA [38:28]

Untuk selisih suara yang dipersoalkan itu 5.958 suara.

437. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:33]

Oke, 5.958, ya?

438. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUGUM RIDHO PUTRA [38:40]

Ya.

439. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:42]

Oke, terus suara yang benar di Petitem gimana?

440. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUGUM RIDHO PUTRA [38:45]

Suara yang benar Partai Persatuan Pembangunan itu 34.304 (...)

441. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:48]

34.304

442. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUGUM RIDHO PUTRA [38:51]

Ya.

443. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:52]

Partai Garuda hanya 100 ... 136.

444. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUGUM RIDHO PUTRA [38:55]

Ya, Yang Mulia.

445. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:55]

Oke, ya. Dibacakan Petitemnya.

446. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUGUM RIDHO PUTRA [38:58]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebegini berikut.

Pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2024 pada daerah pemilihan Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tengah, konversi PT. 4%.

Tiga, menetapkan perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda yang benar untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 pada daerah Pemilihan Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tengah, seperti berikut:

Partai Persatuan Pembangunan (Pemohon), perolehan suara yang benar=34.306.

Partai Garuda, perolehan suara yang benar=136 suara.

Empat, memerintahkan kepada Komisi Pemerintah Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

447. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:18]

Oke. Baik, sudah cukup, ya?

448. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUGUM RIDHO PUTRA [40:20]

Ya.

449. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:20]

Ini sebelumnya saya mau konfirmasi, minta konfirmasi Surat Kuasa, ini.

450. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUGUM RIDHO PUTRA [40:26]

Ya, Yang Mulia.

451. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:27]

Surat Kuasanya sini ... ke semuanya para advokat, yang tergabung dalam LBH Bantuan Hukum PPP (LABH), yang beralamat di Diponegoro 60, Menteng. Baik, secara bersama-sama maupun sendiri-

sendiri untuk selanjutnya. Yang di mana ini? Yang asli? Ini ... ini untuk satu kesatuan seluruhnya, bersama? Atau bagaimana ini?

452. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUGUM RIDHO PUTRA [41:03]

Ya. Yang di dalam itu ada (...)

453. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:10]

Nanti ... anu ... ya, tolong di (...)

454. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUGUM RIDHO PUTRA [41:11]

Ya, Yang Mulia.

455. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:12]

Dicek kembali, ya, di Kepaniteraan, ya, Surat Kuasanya, ya. Sudah, ya?

456. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUGUM RIDHO PUTRA [41:26]

Baik, Yang Mulia.

457. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:27]

Ada yang dipersoalkan, Prof.?

458. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [41:30]

Sedikit saja, Mas Gugum. Ini bukti yang menunjukkan kehilangan suara, ini kan kebetulan dengan Garuda, ya?

459. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUGUM RIDHO PUTRA [41:40]

Ya.

460. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [41:41]

Itu ada 5.958, itu selisihnya di TPS mana saja itu? buktinya di mana itu?

461. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUGUM RIDHO PUTRA [41:47]

Ya, Yang Mulia. Jadi karena buktinya sangat banyak (...)

462. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [41:50]

Ya, tetap harus ada buktinya, di mana?

463. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUGUM RIDHO PUTRA [41:52]

Per hari ini kami baru mengumpulkan 1.567 lembar bukti dan baru mau di (...)

464. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [41:59]

Tadi semula, enggak ada bukti, ya. Memang, ya?

465. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUGUM RIDHO PUTRA [42:01]

Yang sebelumnya P-1 dan P-2 saja, Yang Mulia.

466. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [42:04]

P-1, tidak ada bukti yang menunjukkan langsung ke kasusnya ini, ya?

467. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUGUM RIDHO PUTRA [42:08]

Kalau ini (...)

468. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [42:10]

Ke 5.958 itu, belum ada, ya?

469. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUGUM RIDHO PUTRA [42:11]

Kita ajukan C-1 di 4 kabupaten, Yang Mulia. Kabupaten Buol, Poso, Tojo Una-Una, dan Tojo ... Sigi. Cuma ini buktinya dalam ... setelah persidangan baru kita bisa ajukan.

470. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:38]

Oke. Jadi buktinya baru P-1 dan P-2, ya?

471. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUGUM RIDHO PUTRA [42:40]

Ya, Yang Mulia.

472. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:42]

Oke, padahal P-1-nya itu Keputusan KPU, P-2-nya Keputusan KPU juga, 552/2022. Ya, berarti harus ada bukti tambahan, ya?

473. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUGUM RIDHO PUTRA [42:57]

Ya, Yang Mulia.

474. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:58]

Ya, ini sudah memenuhi syarat karena sudah ada bukti fisik. Tapi hanya Bukti fisik P-1 dan P-2. Yang lain yang berkenaan dengan sarannya, lokus yang dipersengketaan, belum ada bukti sama sekali. Akan ditambahkan?

475. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUGUM RIDHO PUTRA [43:15]

Ya, akan kami tambahkan, Yang Mulia.

476. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:17]

Oke, ini nanti batas waktunya sore ini lho, ya.

477. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUGUM RIDHO PUTRA [43:21]

Baik.

478. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:22]

Sekarang yang bisa disahkan, ya, yang hanya 2 ini, P-1 sampai dengan P-2. Ini yang ... yang jadi masalah gini, Mas Gugum.

479. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUGUM RIDHO PUTRA [43:29]

Ya.

480. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:30]

Yang ajukan PPP, tapi buktinya hanya P-1 dan P-2, kurang 1.

481. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUGUM RIDHO PUTRA [43:37]

Baik, Yang Mulia.

482. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:38]

Ya. Berarti disahkan Bukti P-1 dan P-2, ya?

483. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUGUM RIDHO PUTRA [43:42]

Baik.

484. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:43]

Nanti bukti yang lain, ditambahkan sore ini, ya?

485. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: GUGUM RIDHO PUTRA [43:46]

Baik, Yang Mulia.

486. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:47]

Oke, disahkan Bukti P-1 dan P-2.

KETUK PALU 1X

Ini Mas Gugum ini, sudah biasa beracara di sini, tapi dalam PUU, jadi kita hafal ini. Berikutnya sekarang Perkara 98 yang diajukan oleh Partai NasDem, Kuasanya mana?

487. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [44:20]

Hadir, Yang Mulia.

488. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:22]

Oke. Kalau bisa, itu satu ... nah anu ... tambah itu di depan masih ada kursi kosong.

489. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [44:28]

Oh, baik.

490. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:29]

Enggak bayar kalau di depan. Diajukan Partai NasDem, Pihak Terkaitnya berkenaan dengan dua persoalan. Yang satu berkait dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Yang satu berkaitan dengan Partai Gerindra. Pihak Terkaitnya?

491. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMANSYAH [44:56]

Dari Partai Gerindra, Yang Mulia.

492. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:59]

Gerindra. PKB? Ada, ya? Ya, oke.

493. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [45:02]

Ya. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum wr. wb. Langsung saja, Majelis, untuk lebih efisien ... untuk mengefisienkan waktu. Pada dasarnya Permohonan ini sama seperti yang diajukan partai-partai lain, yaitu Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pembelian Umum Nomor 360 Tahun 2004 ... 2024 dan seterusnya, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu (...)

494. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:30]

Ya. Ini ... anu ... pada umumnya Partai NasDem ... sebentar. Surat Kuasa yang tanda tangan antara Ketua Umum Pak Surya Paloh, dengan

KTP-nya tanda tangannya beda sama sekali ini. Ini yang tanda tangan, ya. Ya, tanda tangan di KTP dan tanda tangan di Surat Kuasa beda sekali. Surat Kuasa yang tanda tangan siapa ini?

495. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [46:01]

Izin, Majelis. Sepengetahuan kami, Bapak Surya Paloh langsung.

496. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:02]

Tapi kok beda sekali, ya?

497. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [46:07]

Izin, Majelis. Untuk KTP dari Pak Surya Paloh yang kami ajukan itu tahun 2014.

498. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:14]

Lha, ya, masa tanda tangannya berubah sama sekali?

499. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [46:18]

Izin, Majelis. Kalau misalnya diperkenankan nanti akan kami perbaiki.

500. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:21]

Ya, nanti diperbaiki, ya?

501. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [46:23]

Baik.

502. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:24]

Betul, ini tanda tangannya beda sekali soalnya. Ya, kayak yang di Surat Kuasa, pemberi kuasanya, tanda tangannya sederhana, tapi di KTP-nya tahun 2013 ini. Kalau saya, tanda tangan saya sampai mulai ... apa ... SMA sampai sekarang enggak berubah (...)

503. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 170: WIRADARMA HAREFA [46:51]

Luar biasa, Majelis.

504. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:51]

Hanya berubah kalau tanda tangan amplop yang tebal lebih tebal. Kalau amplopnnya tipis, tanda tangannya tipis, gitu. Bedanya hanya itu, tapi bentuknya sama.

505. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [46:02]

Siap.

506. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:02]

Ya, nanti di ... anu ... diperbaiki, ya.

507. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [46:05]

Baik, izin, Majelis. Nanti akan kami perbaiki (...)

508. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:06]

Ya.

509. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [46:08]

Baik.

510. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:12]

Baik. Silakan, Mas.

511. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [46:12]

Izin, mohon saya lanjutkan, Majelis.

512. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:15]

Ya.

513. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [46:16]

Berdasarkan PMK Nomor 2 Tahun 2023 yang mengajukan sengketa, yaitu ketua umum atau nama lain, sekjen atau nama lain. Dalam hal ini adalah untuk Partai NasDem sendiri, Surya Paloh sebagai Ketua Umum, Hermawi Taslim sebagai Sekjen.

514. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:34]

Sekjen, ya.

515. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [46:36]

Nah, untuk pengajuan sengketa itu yaitu Banggai Kepulauan Daerah Pemilihan 2 (...)

516. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:43]

Dan Daerah Pemilihan 1 Kota Palu?

517. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [46:43]

Dan Kota Palu Daerah Pemilihan 1.

518. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:46]

Ya, terus?

519. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [46:51]

Untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini (...)

520. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:53]

Dianggap berwenang, ya?

521. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [46:53]

Yaitu mengingat Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengingat Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (...)

522. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:04]

Ya. Itu dianggap dibacakan, berwenang.

523. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [48:07]

Mohon dianggap dibacakan.

524. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:08]

Ya.

525. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [48:08]

Berwenang.

526. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:11]

Terus kemudian, tenggat waktunya?

527. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [48:13]

Untuk tenggang waktu (...)

528. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:14]

Tidak melewati.

529. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [48:15]

Tidak melewati, Majelis.

530. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:16]

Ya.

531. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [48:17]

Karena kami mengajukan pada tanggal 23 Maret 2024 dan (...)

532. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:21]

Pukul 19.53 WIB.

533. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [48:23]

Pukul 19.53 WIB.

534. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:24]

Oke. Kedudukan hukum yang mengajukan partai?

535. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [48:29]

Berdasarkan putusan ... keputus ... Keputusan KPU Nomor 552 itu adalah peserta pemilu. Dalam hal ini adalah Partai NasDem dan 551, untuk Nomor Urut 5, sehingga Partai NasDem ... Pemohon mempunyai kedudukan.

536. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:54]

Ya. Tapi itu tadi Surat Kuasanya di ... anu ... ya.

537. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [48:57]

Baik.

538. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:58]

Tanda tangannya dikonfirmasi dan diperbaiki, ya. Karena kalau itu Surat Kuasa itu yang tanda tangan bukan Pak Surya Paloh, beda, maka itu juga tidak sah, ya, kan? Kalau tidak sah berarti tidak punya legal standing. Jadi itu ... anu ... sangat penting sekali untuk diperbaiki, ya?

539. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [49:19]

Baik, Yang Majelis.

540. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:20]

Ya. Terus?

541. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [49:22]

Kami lanjut, Majelis, untuk (...)

542. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:24]

Lanjut yang dipersengketakan.

543. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [49:26]

Untuk (...)

544. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:27]

Sulawesi Tengah dulu.

545. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [49:28]

Kalau (...)

546. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:29]

Kabupaten Banggai Kepulauan 2.

547. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [49:31]

Untuk Banggai Kepulauan 2.

548. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:33]

Ya.

549. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [49:34]

Pokok dari sengketa ini adalah tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu Nomor 01 dan seterusnya, pada tanggal 20 ... 22 Februari 2024 terkait pes ... pemungutan suara ulang.

550. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:54]

Oke. Jadi, ini nanti di-Petitumnya minta apa ini, yang Banggai?

551. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [50:00]

Meminta pemungutan suara ulang, Majelis.

552. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:04]

Ya. Di mana saja?

553. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [50:05]

Untuk TPS 001, Desa Tatakalai.

554. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:10]

Oke.

555. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [50:12]

Desa Tatakalai.

556. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:16]

Itu rekomendasinya yang Nomor 01 itu, ya?

557. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [50:19]

Ya, Majelis.

558. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:21]

Oke. Bukti P-4 itu, ya.

559. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [50:23]

Bukti P-4.

560. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:24]

Oke. Terus?

561. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [50:27]

Pada dasarnya, untuk selisih suara itu kami untuk Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa ada 13 suara partai. Kemudian, untuk jumlah pemilih DPT di Desa Tatakalai ada 199 orang. Nah, pada dasarnya pengajuan sengketa ini adalah kursi pimpinan, Majelis. Mempengaruhi kursi pimpinan (...)

562. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:52]

Oke.

563. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [50:53]

Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan 2.

564. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:56]

Oke. Kalau itu perolehan suaranya berubah (...)

565. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [50:58]

Maka potensi (...)

566. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:59]

Bisa yang menjadi pimpinan (...)

567. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [51:02]

Pimpinan DPRD adalah kami Partai NasDem.

568. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:03]

DPRD bisa Partai NasDem.

569. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [51:05]

Ya.

570. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:06]

Tapi Partai Gerinda suaranya kok 2.090? Kemudian Partai Golkar=3.870?

571. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [51:16]

Ya. Mohon izin, Majelis.

572. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:18]

Ini untuk menjadi pimpinan artinya wakil, ya?

573. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [51:21]

Pimpinan ketua, Majelis.

574. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:23]

Hah, ketuanya?

575. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [51:24]

Ketua, ketua DPRD Kabupaten Banggai.

576. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:26]

Lho, suara yang tertinggi malah Partai Golkar?

577. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [51:30]

Izin, Majelis.

578. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:31]

Ya.

579. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [51:32]

Untuk Partai Golkar memang suaranya signifikan, tapi penyebaran suaranya tidak merata.

580. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:36]

Oh.

581. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [51:37]

Di Daerah Pemilihan 2 ... 3 (...)

582. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:40]

Gerindra?

583. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [51:42]

Sama, Majelis.

584. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:44]

Ini Gerindra kan yang kedua, nih. Saya ... anukan ... ya. Betul, ya? Yang anda tulis di sini Partai Golkar ... eh ... Partai Gerindra=2.090.

585. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [51:54]

Baik.

586. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:54]

Kemudian Partai Golkar=3.080. Ini ada persebarannya, ya. Sehingga untuk menentukan ... anu ... pemilihan ketua itu juga ... anu, ya ... selain yang unggul siapa, tapi juga persebarannya?

587. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [52:11]

Ya, yang kami pahami seperti itu, Majelis.

588. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:13]

Oke, oleh karena itu ini ada berapa suara yang diklaim untuk ditambahkan Partai NasDem?

589. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [52:19]

Kalau melihat daftar DPT itu 199 daftar pemilih. Yang selisih dengan PKB=13 suara, sehingga potensi untuk malampaui suara PKB.

590. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:35]

Oke, ya.

591. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [52:36]

Dengan objek sengketa sebagaimana rekomendasi Bawaslu yang tidak dilaksanakan oleh KPU.

592. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:42]

KPU. Ya, Itu yang Banggai, ya?

593. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [52:45]

Ya.

594. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:46]

Sekarang yang kedua, yang Kota Palu. Dapil 1 Kota Palu, gimana?

595. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [52:52]

Izin, Majelis. Untuk ... bila diperkenankan untuk Kota Palu akan disampaikan rekan saya.

596. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:46]

Boleh.

597. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [53:00]

Izin, Majelis, melanjutkan.

598. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:02]

Oh, di belakang. Di depan masih ada kosong, satu. Takut sama sebelahnya?

Ini malah yang pojok sendiri ini orangnya kalem, pendiam, kok, kecil, pendiam, kok, malah takut. Di sana, yang di belakang malah menakutkan itu.

Ya. Silakan. Biar masuk TV, Mbak di depan.

599. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [53:35]

Izin, Majelis.

600. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:35]

Ya.

601. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [53:37]

Permohonan Provinsi Sulawesi Tengah untuk Daerah Pemilihan Kota Palu 1.

602. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:42]

Ya.

603. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [53:41]

Bahwa Pokok Permohonan Pemohon ini diajukan berdasarkan adanya tindakan Termohon yang tidak menindaklanjuti putusan dari Bawaslu Kota Palu.

604. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:51]

Oke.

605. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [53:52]

Tabel, persandingan perolehan suara menurut Pemohon Partai NasDem untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palu Daerah Pemilihan Palu 1. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

606. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:04]

Ya.

607. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [54:07]

Bahwa Pemohon belum dapat memastikan jumlah total suara Pemohon untuk pemilihan Anggota DPRD Kota Palu Daerah Pemilihan 1 Kota Palu, disebabkan tidak dilaksanakannya Keputusan Bawaslu Nomor 001 dan seterusnya, tertanggal 18 Maret 2024.

608. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:30]

Oke.

609. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [54:31]

Poin 3, 4, dan 5 (...)

610. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:32]

Jadi, ini tidak bisa menulis suara yang benar, karena belum dilakukan?

611. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [54:37]

Siap, Yang Mulia.

612. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:38]

Ya.

613. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [54:39]

Untuk poin 3, 4, dan 5, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

614. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:43]

Ya. Terus?

615. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [54:46]

Bahwa perbuatan Termohon yang tidak menggunakan proyektor dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Mantikulore, telah mengakibatkan tidak dapat disaksikannya proses penginputan data C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota ke dalam aplikasi Sirekap dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan.

Bahwa pada saat Pemohon keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, Pemohon meminta untuk dilakukan pengecekan terhadap semua TPS, namun Termohon tidak melakukan pembetulan.

616. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:34]

Oke.

617. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [55:35]

Bahwa dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil perhitungan suara di kabupaten/kota yang diajukan oleh Pemohon melalui saksi Pemohon, Termohon berkewajiban seketika melakukan pembetulan.

Bahwa Pemohon beranggapan masih menyisakan permasalahan yang terjadi di delapan TPS di Kecamatan Mantikulore pada proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan pada tanggal 17 Februari sampai dengan 2 Maret 2024 sebagai berikut. Mohon anggap dibacakan, Yang Mulia.

618. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:13]

Oh itu ... anu ... ya, ada berapa? 8?

619. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [56:15]

8 TPS, Yang Mulia.

620. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:16]

8 TPS, ya. Terus?

621. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [56:20]

Bahwa adapun permasalahan yang terjadi di TPS, sebagaimana diuraikan di atas adalah sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

622. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:30]

Ya.

623. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [56:32]

Bahwa kemudian atas pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon telah mengajukan laporan yang telah diterima dan ditetapkan dalam Berita Acara Pleno Nomor 019 dan seterusnya, tertanggal 8 Maret 2024, pukul 20.00 WITA, bertempat di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu (Bukti P-22).

624. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:58]

Ya.

625. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [56:59]

Bahwa kemudian Pemohon menemukan permasalahan lain di 13 TPS Kecamatan Mantikulore dan sudah dilaporkan ke Bawaslu. Namun, Bawaslu tidak lagi menerima bukti tambahan dengan alasan proses sidang sudah masuk pada agenda kesimpulan para pihak. Bahwa adapun permasalahan yang terjadi di 13 TPS, terdapat penggelembungan dan pergeseran suara, perbedaan jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah, penambahan dan pengurangan daftar pemilih, hilang dan bertambahnya jumlah suara dalam TPS, sebagaimana yang akan dijadikan bukti tambahan Pemohon uraikan di atas adalah sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

626. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:44]

Ya. Itu dalilnya sudah cukup, sekarang Petitumnya. Jadi itu ada berapa? 15 TPS, ya?

627. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [56:52]

15 TPS.

628. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:53]

Yang di Petitum, ya? Ya, dibacakan.

629. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [57:58]

Bahwa terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilu Kota Palu Nomor 001 dan seterusnya, tertanggal 18 Maret 2024, Termohon tidak melaksanakan perintah putusan tersebut sebagaimana mestinya, yaitu di mana Termohon telah melampaui batas waktu dalam pelaksanaan putusan a quo dan pada saat kegiatan tidak lanjut atas Putusan Bawaslu, Termohon hanya melaksanakan penyandingan di hasil Sirekap DPRD kabupaten/kota dengan C.Hasil salinan DPRD kabupaten/kota. Seharusnya Termohon melakukan perbaikan tata cara prosedur atau mekanisme pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (6) PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Bahwa saksi Pemohon sudah mengajukan keberatan secara lisan dalam kegiatan tindak lanjut atas Putusan Bawaslu Nomor 001 dan seterusnya, tertanggal 18 Maret 2024. Selanjutnya saksi Partai NasDem dipersilakan walkout sebagai bentuk keberatan atas jalannya kegiatan tersebut, yang tidak sesuai dengan Putusan Bawaslu. Bahwa Pemohon tidak dapat memperoleh kepastian suara atas dasar tidak dilaksanakannya Putusan Bawaslu Kota Palu Nomor 001 dan seterusnya, tertanggal 18 Maret 2024.

Bahwa berdasarkan Pasal 14 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan KPU berkewajiban melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu.

630. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:55]

Ya. Bahwa ... sekarang Petitemnya. Tinggal Petitem itu.

631. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [57:57]

Ya.

632. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:58]

Dalilnya semua sudah.

633. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [57:59]

Ya. Petitum, Yang Mulia.

634. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:01]

Ya.

635. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [01:00:03]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang (PSSU) di Daerah Pemilihan 1 Kota Palu, sepanjang TPS (...)

636. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:21]

Enggak, yang di depan itu dibaca dulu.

637. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [01:00:24]

Oh. Izin, Yang Mulia.

638. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:24]

Satu, dua, tiganya. Itu kan langsung, ya.

639. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [01:00:27]

Siap, Yang Mulia. Saya ulangi, Yang Mulia. Izin, Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Satu, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua, membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun (...)

640. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:50]

Dan seterusnya sepanjang (...)

641. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [01:00:51]

Dan seterusnya (...)

642. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:53]

Sepanjang (...)

643. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [01:00:53]

Sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Banggai Kepulauan 2 dan daerah pemilihan Kota Palu 1 untuk pengisian anggota DPRD kabupaten/kota.

644. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:02]

Ya.

645. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [01:01:03]

Tiga, memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan penghitungan suara ulang (...)

646. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:08]

PSU, ya?

647. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [01:01:10]

PSU (...)

648. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:11]

Ya.

649. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [01:01:11]

Di daerah pemilihan 2 Kabupaten Banggai Kepulauan, TPS 001 Desa Tatakalai, Kecamatan Tinangkung Utara.

650. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:21]

Ya, yang Banggai hanya 1 TPS, ya berarti, ya?

651. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [01:01:23]

Siap, Yang Mulia. Satu TPS.

652. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:24]

Oke. Terus yang dua (...)

653. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [01:01:26]

Empat, memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang (...)

654. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:31]

Penghitungan suara ulang. Ya.

655. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [01:01:35]

Di Daerah Pemilihan 1 Kota Palu sepanjang TPS.

656. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:39]

Itu ada banyak TPS itu, ya? (...)

657. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [01:01:41]

Ya, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

658. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:42]

Ya. Mulai dari TPS 24 (...)

659. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [01:01:45]

Sampai dengan TPS 05 (...)

660. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:45]

Sampai dengan TPS 05?

661. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [01:01:48]

Ya, Yang Mulia.

662. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:48]

Mantikulore, ya?

663. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [01:01:50]

Kelurahan Kawatuna.

664. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:51]

Ya.

665. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [01:01:52]

Atau, lima, memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Daerah Pemilihan 1 Kota Palu sepanjang TPS ... mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

666. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:05]

Ya, ini malah TPS-nya beda, ya? Kalau PSU-nya di (...)

667. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [01:02:09]

Beda, beda, Yang Mulia.

668. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:10]

Lebih banyak di PSU-nya, ya?

669. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [01:02:12]

Lebih banyak penghitungan surat suara ulang, Yang Mulia, PSSU. (...)

670. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:16]

Penghitungannya? Penghitungannya berapa itu? A sampai dengan U berapa itu?

671. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [01:02:21]

21 TPS, Yang Mulia.

672. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:22]

21 TPS, tapi kalau PSU-nya di berapa?

673. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [01:02:26]

15 TPS, Yang Mulia.

674. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:27]

15, oke. Terus, selanjutnya?

675. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [01:02:34]

Enam, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami, Pemohon Kuasa Hukum Pemohon.

676. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:49]

Oke.

677. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [01:02:50]

Ditandatangani, Yang Mulia.

678. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:51]

Ya. Prof. Enny, ada? Silakan, Prof.

679. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:02:57]

Sedikit saja ini, ya. Ini ke Bawaslu, ya. Itu terkait dengan Putusan Bawaslu 001 yang kemudian tidak dilaksanakan oleh Termohon, memang begitu adanya? Ya, tolong itu nanti dilengkapi. Kemudian, apakah Termohon melaksanakan penyandingan itu dasarnya memang D.Hasil Sirekap sebagai dalil Pemohon, dengan D ... C.Hasil Salinan, itu apakah menggunakan itu? Itu tolong nanti dilengkapi, ya, yang terkait dengan dalil itu. Karena di sini menyebutkan D.Hasil Sirekap.

Kemudian ini terkait dengan Permohonan Pemohon. Itu yang dimintakan PSU kan yang satu, dalil yang pertama di Banggai Kepulauan itu, ya.

680. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [01:03:44]

Siap, Yang Mulia.

681. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:03:44]

Yang 13 suara itu. Kemudian, di sini memang ada perbedaan, ya? Yang 15 itu untuk PSU, yang dalil alternatifnya itu. Kemudian Petitem alternatif. Kemudian, yang 21 itu penghitungan surat suara ulang.

682. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [01:03:57]

Siap, Yang Mulia.

683. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:03:58]

Gabungan dari yang 8 TPS, dan 13 TPS?

684. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [01:04:00]

Siap, Yang Mulia.

685. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:04:00]

Tapi yang 15 TPS untuk PSU itu, dia di luar yang 13 TPS, sisanya?

686. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [01:04:08]

Untuk yang 15 ini, Yang Mulia, sudah termasuk dengan yang 8 TPS (...)

687. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:04:13]

Tidak semuanya dari (...)

688. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [01:04:13]

Dalam putusan. Tidak, tidak semua, Yang Mulia.

689. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:04:16]

Tidak semua dari yang 8 diambil dan 13 yang diambil, ya?

690. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [01:04:20]

Siap, Yang Mulia.

691. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:04:20]

Yang dipilih-pilih saja di sini?

692. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [01:04:21]

Ya, Yang Mulia.

693. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:04:23]

Oke, ya. Itu saja, Pak Ketua.

694. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:25]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Prof. Ya, silakan.

695. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:04:28]

Baik, terima kasih. Ini minta ... apa ... penegasan dari KPU terkait dengan pernyataan Kuasa Pemohon. Apa memang untuk penentuan pimpinan DPRD, seperti yang disampaikan tadi, selain dari jumlah kursi terbanyak, juga ditentukan oleh persebaran suara?

696. TERMOHON: BETTY EPSILON IDROOS [01:04:52]

Ya, jika terdapat ... apa ... jumlah yang sama.

697. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:04:57]

He em.

698. TERMOHON: BETTY EPSILON IDROOS [01:04:57]

Maka langkah berikutnya adalah jumlah persebarannya, Yang Mulia. Misalnya, jumlah kursi yang diperoleh Partai A dan Partai B sama, maka yang dilihat berikutnya adalah jumlah sebaran, dari perolehan suaranya.

699. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:05:13]

Artinya tetap ditentukan oleh jumlah suara terbanyak, kan?

700. TERMOHON: BETTY EPSILON IDROOS [01:05:17]

Ya, betul.

701. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:05:19]

Baik, terima kasih.

702. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:20]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-35?

703. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [01:05:30]

Ya. Ya, Majelis. Kami mengajukan Bukti P-1 sampai P-35.

704. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:34]

Oke, kenapa yang menjawab kok Anda, bukan sebaliknya? Suaranya kan bagus yang Ibu.

705. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [01:05:45]

Ya, Majelis.

706. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:46]

P-1 sampai dengan P-35, ya?

707. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [01:05:48]

Ya, Majelis.

708. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:49]

Baik. Tapi ada masalah P-1 sampai dengan P-10 itu legesnya, ya? Hanya kopi leges, ya? Nanti diperbaiki, ya? Di Kepaniteraan, ya?

709. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RAHMAT HIDAYAT [01:06:01]

Baik.

710. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:02]

Setelah selesai persidangan ini, ya.

711. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [01:06:08]

Izin, Majelis.

712. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:09]

Ya, apa?

713. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [01:06:10]

Sekadar menyampaikan info, Majelis. Jadi pada tanggal 27 April 2024 (...)

714. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:18]

Dibuka?

715. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [01:06:18]

Ya, pembukaan (...)

716. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:19]

Oke.

717. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [01:06:19]

Kotak suara, Yang Mulia.

718. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:20]

Ya, nanti (...)

719. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [01:06:21]

Oleh KPU.

720. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:21]

Direspons pembukaannya sah atau tidak, ya?

721. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [01:06:24]

Ya.

722. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:24]

Menurut (...)

723. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [01:06:25]

Ada kami temukan kejadian, Yang Mulia.

724. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:27]

Apa kejadiannya?

725. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [01:06:28]

Jadi, pada saat buka kotak suara rekap itu, Yang Mulia, sebagian besar kotak rekap sudah tidak tersegel.

726. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:34]

Oke.

727. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [01:06:34]

Ya, kemudian, amplop berisi dokumen yang ada dalam kotak rekap, itu pun sudah tidak tersegel, Yang Mulia.

728. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:42]

Oke.

729. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [01:06:43]

Dokumen sudah tercecer ke kotak yang lainnya, Yang Mulia, kami temukan.

730. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:47]

Ya.

731. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [01:06:47]

Bahkan ada dua daftar hadir yang hilang, Yang Mulia.

732. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:50]

Oke, Saudara hadir, siapa yang hadir di situ?

733. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [01:06:54]

Saya sendiri, Yang Mulia, sebagai saksi.

734. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:56]

Oke.

735. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [01:06:57]

Ya, itu kami punya bukti foto dan video.

736. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:59]

Hadir sendiri, ya?

737. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [01:07:00]

Siap, Yang Mulia.

738. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:01]

Waktu itu yang hadir, siapa saja?

739. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [01:07:03]

Kami dua orang dari Partai NasDem, Yang Mulia.

740. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:05]

Partai NasDem. Selain Partai NasDem, yang hadir?

741. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [01:07:08]

Ada dari Partai Gerindra dan partai lainnya, Yang Mulia.

742. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:11]

Oke, berapa ... berapa partai (...)

743. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [01:07:12]

Ya, ada dari Bawaslu juga.

744. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:13]

Seluruh peserta pemilu dipanggil?

745. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [01:07:15]

Ya, Yang Mulia.

746. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:16]

Oke, ya, nanti dijelaskan, Termohon, ya.

747. TERMOHON: BETTY EPSILON IDROOS [01:07:19]

Siap, nanti kami konfirmasi dengan teman-teman KPU (...)

748. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:21]

Ya, he eh, ya.

749. TERMOHON: BETTY EPSILON IDROOS [01:07:22]

Kabupaten/kota.

750. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:22]

Itu ada polisi, enggak?

751. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [01:07:24]

Ada, Yang Mulia.

752. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:24]

Bawaslu, ada kan?

753. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [01:07:25]

Bawaslu ada, Yang Mulia. Bahkan pada saat Berita Acara, Bawaslu tidak mau menandatangani Berita Acara, Yang Mulia.

754. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:32]

Oke, betul Bawaslu nanti ... anu ... ya.

755. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [01:07:33]

Jadi hanya hadir menyaksikan, ikut menyaksikan.

756. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:36]

Oke, ya. Nanti KPU juga, anu, di dalam pembukaan kotak itu yang harus tanda tangan siapa, ya? Nanti dijelaskan. Bawaslu juga, ya? Kan Bawaslu dikatakan tidak tanda tangan tadi.

757. BAWASLU: HERWYN J H MALONDA [01:07:48]

Izin, Yang Mulia. Di proses memang Bawaslu tidak boleh tanda tangan.

758. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:52]

Memang tidak tanda tangan.

759. BAWASLU: HERWYN J H MALONDA [01:07:53]

Berita Acara.

760. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:53]

Ya, nanti aturannya gimana dijelaskan, ya?

761. BAWASLU: HERWYN J H MALONDA [01:07:56]

Ya.

762. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:56]

Oke.

763. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [01:07:58]

Ya, nanti setelah selesai pengambilan bukti, Yang Mulia. Baru segel ... apa ... kotak rekap disegel kembali, Yang Mulia, nanti setelah itu.

764. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:05]

Oke, nanti direspons, ya, KPU dan Bawaslu, ya. Baik, Saudara mengajukan bukti tadi P-1 sampai dengan P-35, toh.

765. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [01:08:20]

Siap, Yang Mulia.

766. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:21]

Yang P-1 sampe 10 belum ... anu ... ya, lengkap nanti diperbaiki ya

767. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [01:08:25]

Siap, Yang Mulia.

768. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:26]

Jadi, P-1 sampai dengan P-35 disahkan, ada catatan yang harus dilengkapi, ya.

769. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: INGGRITH S.R. LUNETO [01:08:33]

Siap, Yang Mulia.

770. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:33]

Baik, disahkan.

KETUK PALU 1X

Berikutnya, sekarang Perkara Nomor 104 diajukan oleh Partai Gerindra dan Pihak Terkaitnya Partai NasDem, ya. Partai NasDem, ada? Oke, ya, silakan berganti. Karena buka-buka ... anu apa ... dokumennya kalau ada mejanya kan enak, jadi gentian. Kalau dikasih meja semua, enggak cukup ruangnya. Silakan Perkara 104.

771. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI [01:09:43]

Izin, Yang Mulia.

772. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:44]

Ya.

773. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI [01:09:45]

Sebelum membacakan Permohonan, saya ingin menyampaikan beberapa hal.

774. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:49]

Apa yang disampaikan?

775. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI [01:09:50]

Dikarenakan ada 2 dapil, maka saya akan bergantian membacakan dengan rekan saya.

776. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:54]

Boleh.

777. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI [01:09:55]

Dan juga untuk Petitum akan dibacakan setelah dua per (...)

778. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:00]

Ya (...)

779. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI [01:10:00]

Dua permohonan dibacakan, Yang Mulia.

780. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:04]

Silakan.

781. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI [01:10:07]

Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi ... konstitusi (...)

782. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:11]

Itu dianggap dibacakan.

783. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI [01:10:12]

Dianggap dibacakan. Perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan seterusnya, dan seterusnya, dianggap dibacakan. Bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya untuk pengisian calon Anggota DPRD Kabupaten Buol, Daerah Pemilihan Buol 3, serta Daerah Pemilihan Morowali 2 Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap berwenang atau (...)

784. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:010:45]

Ya.

785. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI [01:10:46]

Dibacakan (...)

786. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:46]

Ya.

787. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI [01:10:47]

Kedudukan Hukum Pemohon dianggap dibacakan.

788. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:50]

Ya.

789. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI [01:10:51]

Untuk Tenggang Waktu Pengajuan Permohonon ... Permohonan dianggap dibacakan (...)

790. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:56]

Masih dalam tenggang waktu, ya?

791. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI [01:10:57]

Ya.

792. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:58]

Diajukan kapan itu?

793. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI [01:11:00]

Di tanggal (...)

794. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:01]

23.

795. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI [01:11:02]

23, Yang Mulia.

796. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:03]

Ya, terus.

797. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI [01:11:05]

Selanjutnya untuk pokok ... Pokok Permohonan akan dibacakan oleh rekan Saya, Yang Mulia. Untuk Daerah Pemilihan Boul ... Boul terlebih dahulu

798. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:14]

Ya, silakan.

799. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FARIZ SALMIN [01:11:18]

Izin, Yang Mulia. Melanjutkan untuk (...)

800. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:20]

Ya.

801. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FARIZ SALMIN [01:11:24]

Bahwa pengajuan ... menga ... bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU ini dikarenakan adanya pelanggaran pemilu yang merugikan hasil perolehan suara Pemohon sebagai berikut yang.

Pertama, persandingan perolehan suara Pemohon, untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Dapil Buol 3.

802. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:011:42]

Ya.

803. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FARIZ SALMIN [01:11:43]

Persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon. NasDem=12.000, Gerindra=11.000.

804. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:52]

Ya.

805. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FARIZ SALMIN [01:11:54]

Izin, Yang Mulia. Kita mau renvoi mengenai tentang Permohonan, karena dalam angka 12.000 itu ada plus PSU. Itu kami mau renvoi, dihapuskan, atau dihapuskan PSU itu.

806. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:08]

Ya.

807. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FARIZ SALMIN [01:12:09]

Ya.

808. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:10]

Jadi itu angkanya sudah benar itu?

809. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FARIZ SALMIN [01:12:11]

Ya, Yang Mulia.

810. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:12]

Kalau sudah benar kenapa dipersoalkan? NasDem 12.429 menurut Pemohon. Menurut Termohon juga 12.429.

811. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FARIZ SALMIN [01:12:23]

Oh, ndak, Yang Mulia. Kita karena ada rekayasa daftar hadir, Yang Mulia.

812. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:29]

Oh, yang dipersoalkan rekayasa daftar hadir?

813. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FARIZ SALMIN [01:12:31]

Ya, ya, Yang Mulia.

814. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:32]

Tapi perolehan suaranya benar sudah?

815. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FARIZ SALMIN [01:12:35]

Benar, Yang Mulia.

816. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:36]

Oh, terus untuk Gerindra=11.239.

817. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FARIZ SALMIN [01:12:41]

Ya.

818. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:42]

Menurut Termohon. Menurut Pemohon juga sama?

819. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FARIZ SALMIN [01:12:45]

Ya, Yang Mulia.

820. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:46]

Oke. Lha, suaranya sudah sama, sudah diakui, kenapa dipersoalkan?

821. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FARIZ SALMIN [01:12:51]

Yang kita mau laporkan ini tentang ini, kita ajukan Permohonan ini tentang rekayasa daftar hadir, Yang Mulia.

822. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:57]

Kenapa rekayasa? Apakah itu (...)

823. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FARIZ SALMIN [01:12:59]

Karena dalam daftar hadir itu, tidak ada ... tiada terdapat absen dan dalam daftar hadir itu ... apa namanya ... tanda tangannya sama semua.

824. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:09]

Oke.

825. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FARIZ SALMIN [01:13:10]

He eh.

826. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:11]

Berarti kalau begitu, apa yang terjadi di situ mengenai daftar hadir dan sebagainya berpengaruh pada perolehan suara?

827. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FARIZ SALMIN [01:13:17]

Ya, berpengaruh.

828. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:19]

Kalau begitu, belum tentu menurut Pemohon suara Gerindra sekian, gitu kan?

829. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FARIZ SALMIN [01:13:24]

Ya. Makanya, kalau kita mengajukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) mungkin kita bisa dapat kursi yang terakhir, Yang Mulia, dari Partai Gerindra.

830. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:32]

Nah, makanya itu sebetulnya persandingannya ini menurut Pemohon, masih dikasih tanda tanya kan, karena ada persoalan, kan.

831. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FARIZ SALMIN [01:13:38]

Ya, ya, benar.

832. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:39]

Kalau begini kan seolah-olah sudah diakui.

833. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FARIZ SALMIN [01:13:43]

Ya, Yang Mulia.

834. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:44]

Ya, kan?

835. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FARIZ SALMIN [01:13:47]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

836. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:49]

Ya. Itu persoalan-persoalan yang bersifat administratif, ya?

837. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FARIZ SALMIN [01:13:54]

Ya, Yang Mulia.

838. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:55]

Nah, persoalan-persoalan yang bersifat administratif itu, apakah sudah dilaporkan ke Bawaslu?

839. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FARIZ SALMIN [01:14:01]

Sudah dilaporkan.

840. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:02]

Apa laporannya? Kapan laporannya? Dan dilaporkan pada kapan itu? Coba disampaikan saja, enggak usah dibaca satu-satu. Gimana?

841. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FARIZ SALMIN [01:14:15]

Yang pertama itu, kita ... ketua KPPS tidak memenuhi prinsip (suara tidak terdengar jelas) (...)

842. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:22]

Itu mestinya minta ringkasannya, sudah hafal itu.

843. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FARIZ SALMIN [01:14:23]

Namun, tidak ... kami mengajukan ... surat pernyataan, ada surat pernyataan ... Bukti P-8 atas nama Amrin A Sihan.

844. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:35]

Ya, terus?

845. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FARIZ SALMIN [01:14:36]

Terus, atas nama Ahmadi.

846. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:39]

Ya.

847. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FARIZ SALMIN [01:14:40]

Bukti P-9 atas nama Saharum, (Bukti P-10). Atas nama Abdul Kadir A Sukarna (Bukti P-11).

848. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:49]

Itu, semua itu berkenaan dengan apa itu?

849. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FARIZ SALMIN [01:14:52]

Berkenaan dengan absen. Bahwa ada nama mereka tertera dalam absen, ternyata yang sesungguhnya, faktanya mereka tidak bertanda tangan.

850. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:00]

Daftar hadirnya?

851. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FARIZ SALMIN [01:15:01]

Ya.

852. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:02]

Daftar hadir ada nama, tapi sebetulnya yang bersangkutan, tidak bertanda tangan? (...)

853. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FARIZ SALMIN [01:15:05]

Tidak bertanda tangan.

854. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:07]

Kok tahu tidak tanda tangan, sebetulnya? Ada pernyataan dari yang bersangkutan? (...)

855. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FARIZ SALMIN [01:15:11]

Ada pernyataan, Yang Mulia. Kita lampirkan dalam bukti.

856. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:14]

Bukti berapa itu? Jadi, misalnya ini, pemilih atas nama Amrin A Sihan, dengan NIK sekian, di TPS ini, itu dia itu sebetulnya tidak datang?

857. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FARIZ SALMIN [01:15:27]

Siap, tidak datang, Yang Mulia.

858. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:29]

Tidak datang, tapi terus ditandatangani. Ada tanda tangan, dan ada yang nyoblos.

859. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FARIZ SALMIN [01:15:32]

Ya, ada yang nyoblos.

860. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:35]

Oke. Berarti yang nyoblos, di pas ... dapat diduga orang lain?

861. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FARIZ SALMIN [01:15:38]

Ya, Yang Mulia.

862. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:39]

Kemudian Nomor 2 yang B, Ahmad ini juga sama?

863. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FARIZ SALMIN [01:15:44]

Ya, sama, Yang Mulia.

864. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:46]

Sama persoalannya?

865. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FARIZ SALMIN [01:15:47]

He em.

866. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:48]

Jadi daftar hadir ditandatangani oleh orang lain, orangnya tidak hadir?

867. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FARIZ SALMIN [01:15:52]

Tidak hadir.

868. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:53]

Kok tahu tidak hadir dari mana?

869. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FARIZ SALMIN [01:15:55]

Dari pengakuan mereka, ya sudah (...)

870. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:57]

Oke, pengakuan.

871. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FARIZ SALMIN [01:15:57]

Yang Mulia, he em.

872. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:00]

Nanti KPU merespons, ya. Bawaslu ada ... tahu enggak ini ada persoalan? Setelah diketahui kayak begitu, Anda mengadakan protes?

873. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FARIZ SALMIN [01:16:07]

Ya, ada, Yang Mulia, kita (...)

874. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:10]

Terus, pada waktu penghitungan suara, saksinya tanda tangan enggak?

875. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FARIZ SALMIN [01:16:14]

Saksinya (...)

876. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:18]

Ha? Saksinya Gerindra tanda tangan enggak itu? Kalau saksinya tanda tangan, kan berarti sudah mengakui itu betul. Nanti tolong tanda tangan ada enggak? Tanda tangan saksi di situ.

877. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI [01:16:30]

Izin, nanti pembuktian saja, Yang Mulia.

878. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:33]

Kalau sampai pembuktian. Kalau enggak sampai pembuktian, sudah bisa diputus, gimana? Kok minta, gitu? Kan nanti kalau jawabannya lebih meyakinkan sana dengan buktinya, kan enggak usah dibuktikan. Mahkamah yakin dengan Termohon. Nah ini, Anda juga harus meyakinkan ... anu ... kepada Hakim.

879. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI [01:16:54]

Ya.

880. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:54]

Ya, makanya bukti tertulis itu penting. Jadi dalam sengketa pileg, itu diurutan ... coba baca PMK-nya. Urutan pertama adalah bukti surat atau tulisan. Nah, bukti saksi itu menduduki urutan berikutnya.

881. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI [01:17:13]

Ya.

882. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:13]

Berbeda dengan perkara pidana. Kalau perkara pidana, bukti saksi itu nomor 1. Ya, itu harus diketahui, ini Para Advokat harus tahu. Dalam sengketa itu bukti surat tulisan itu lebih penting, gitu. Ya, ini Saksi Pemohon Saudara Ibrahim, Partai Gerindra, melakukan laporan.

883. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI [01:17:39]

Ya.

884. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:40]

Nah, masalahnya dia itu tanda tangan atau tidak? Nanti, di anu. Ya, di sini dia (...)

885. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI [01:17:46]

Baik, Yang Mulia.

886. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:47]

Katakan dia membuat laporan, tapi P-13.

887. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI [01:17:51]

Ya, Yang Mulia.

888. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:52]

Tapi apakah dia tanda tangan atau tidak? Kalau dia tidak tanda tangan, berarti membuat laporan benar, konsisten. Tapi kalau sudah tanda tangan, oh, kok kalah? Nah, terus dia protes. Nah, itu enggak bisa kan? Ya, itu laporannya Nomor 06, tanda bukti laporan.

Nah, Laporan Bukti 06 ini ditindaklanjuti atau tidak?

889. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI [01:18:19]

Perihal Laporan Nomor 06, Bawaslu Kabupaten Buol memberikan tanggapannya melalui Surat Bawaslu Nomor 56/PP ... 56 dan seterusnya (...)

890. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:37]

5 Maret itu.

891. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI [01:18:38]

Tanggal 5 Maret, Yang Mulia.

892. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:41]

Ya.

893. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI [01:18:41]

Yang isinya bahwa adanya rekayasa daftar hadir pemilih di KPPS di TPS 06 Desa Lamadong 1, Kecamatan Momunu, tidak dapat dikualifikasikan sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu.

Yang ... lalu yang poin B. Bahwa terhadap kelalaian petugas KPPS di TPS 06 Desa Lamadong 1, Kecamatan Momunu yang tidak menyediakan daftar hadir, pada saat pengutan suara telah ditetapkan sebagai temuan pelanggaran administrasi pemilu.

894. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:16]

Oke, ada pelanggaran administrasi pemilu. Terus apa lagi?

895. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI [01:19:21]

Bahwa dalam hal ini, Bawaslu tidak melakukan kewajibannya untuk mengawasi berjalannya Pemilihan Umum di TPS 6 di Desa Lamadong 1, Kecamatan Momunu, Sulawesi Tengah Dapil 3, DPRD Kabupaten Buol.

Berdasarkan fakta-fakta yang kami sampaikan di atas, sangatlah beralasan agar dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

896. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:47]

Ya.

897. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI [01:19:48]

Sebagaimana ketentuan yang diatur dianggap dibacakan, Yang Mulia.

898. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:50]

Ya. Terus itu ... 16 itu apa itu? Angka berikutnya. Pemohon mengaitkan (...)

899. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI [01:19:58]

Bahwa Pemohon berkeyakinan, apabila dilakukan pemungutan suara ulang dengan tertib, maka perolehan suara Pemohon lebih tinggi daripada perolehan suara Partai NasDem, Yang Mulia.

900. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:08]

Oh. Berarti anu ini statement paranormal, belum tentu kan? Asumsi, ya kan? Terus dengan demikian? Pemeriksaan (...)

901. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI [01:20:22]

Ya. Dengan demikian Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi (...)

902. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:26]

Mempertimbangkan itu. Ya. Oke, yang Buol sudah selesai. Sekarang Morowali, gimana? Morowali 2.

903. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI [01:20:31]

Yang Morowali. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan PHPU ini dikarenakan adanya pelanggaran pemilu yang merugikan hasil perolehan suara Pemohon sebagai berikut.

904. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:42]

Pelanggarannya bentuknya apa?

905. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI [01:20:45]

Bahwa telah dilakukan pemilihan umum, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Untuk pelanggarannya bahwa pada saat pelaksanaan pemilu telah terjadi pelanggaran di 9 TPS Daerah Pemilihan Morowali 2.

906. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:58]

9 TPS berupa apa, pelanggarannya?

907. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI [01:21:02]

Jumlah direkap D.Hasil Plano PPK Kecamatan Bahodopi, terjadi perbedaan jumlah pengguna hak pilih DPK atau pemilih menggunakan KTP dan pertimbangan perbedaan angka tersebut harus dibukan ... dibuktikan dengan membuka keseluruhan C.Hasil perolehan suara.

908. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:23]

Jadi, harus mencocokkan C sat ... C.Hasil dengan D.Hasil?

909. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI [01:21:28]

Ya, Yang Mulia.

910. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:29]

Ini, di TPS ... 9 TPS?

911. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI [01:21:33]

Di 9 TPS. Ya, Yang Mulia.

912. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:35]

Oke. Terus perolehan suaranya gimana itu jadinya? Di klaim gimana? Tidak ada, ya?

913. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI [01:21:41]

Tidak ada, Yang Mulia.

914. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:42]

Ya. Hanya pelanggaran ini.

915. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI [01:21:44]

Pelanggaran administrasi.

916. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:46]

Ini tidak diketahui jumlah suaranya?

917. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI [01:21:50]

Ya, Yang Mulia.

918. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:51]

Terus, Anda di dalam petitumnya dua-duanya minta apa ini?

919. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI [01:21:54]

Untuk petitum yang untuk Buol, akan dibacakan oleh rekan saya.

920. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:02]

Ya.

921. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI [01:22:03]

Sebentar, Yang Mulia.

922. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FARIZ SALMIN [01:22:17]

Izin, Yang Mulia, melanjutkan.

923. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:18]

Ya. Petitumnya, gimana?

924. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FARIZ SALMIN [01:22:02]

Untuk petitum pertama, mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya. Dan yang kedua, membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. Sepanjang Daerah Pemilihan Buol 3 untuk pengisian calon anggota DPR Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dan yang ketiga, memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), sepanjang Daerah Pemilihan Buol 3 untuk Kabupaten Buol, untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah.

925. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:11]

Ini anu, seluruh TPS di Buol, ya? Buol 3. Tadi disebutkan TPS-nya, ya? Karena ada itu.

926. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI [01:23:22]

Izin, Yang Mulia.

927. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:23]

Ya.

928. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI [01:23:23]

Ya.

929. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:28]

Coba dibaca lagi, yang anu memerintahkan PSU itu di mana itu? Sepanjang mana?

930. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI [01:23:38]

Di sepanjang pemilihan Buol 3 Kabupaten Buol, pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Buol.

931. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:43]

Berarti seluruh Dapil 3 Buol? Ya? Kalau gitu kan sepanjang seluruhnya toh berarti?

932. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI [01:23:51]

Ya, Yang Mulia.

933. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:52]

Ya?

934. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI [01:23:53]

Kalau berkenan untuk merubah sih di (...)

935. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:59]

Kalau petitum berubah kan enggak boleh.

936. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI [01:24:01]

Ya, untuk itu ... apa namanya ... di semanjang pemilihan Buol 3 Kabupaten Buol untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, di seluruh (...)

937. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:12]

Itu ... itu bisa ditunjukkan berapa ... berapa Kecamatan Dapil Buol 3 itu? Berarti seluruhnya itu?

938. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI [01:24:22]

Ya, Yang Mulia.

939. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:23]

Hah?

Apakah pelanggaran administrasi tadi terjadi di seluruhnya?

Nah, ini kan supaya permohonan itu konsisten antara posita dan petitumnya. Positanya mengatakan ada pelanggaran administrasi di mana saja? Berarti mintanya PSU dimana sesuai dengan posita.

Kalau positanya mengatakan ada begini-begini hanya di sini, suruh seluruhnya, kan enggak konsisten antara posita dan petitum.

Makanya saya tanyakan, ini minta PSU di Dapil Buol 3 seluruhnya, betul?

940. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FARIZ SALMIN [01:25:06]

Izin, Yang Mulia.

Sebenarnya begini, Yang Mulia. Yang bisa kita buktikan dalam posita kami itu adalah hanya TPS 6 di Desa Lamodong 1. Cuma ... melalui nanti, Majelis, mempertimbangkannya yang kita bisa buktikan itu hanya itu, TPS 6 di desa (...)

941. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:26]

Kalau yang terbukti di situ kan PSU-nya hanya di situ.

942. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FARIZ SALMIN [01:25:29]

Ya, Yang Mulia. Mungkin ada kekeliruan dari tim kami untuk menyusun (...)

943. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FARIZ SALMIN [01:25:36]

Nah, kalau kekeliruan di dalam permohonan, apakah enggak bisa dikatakan bahwa itu kabur, permohonan kabur? Gimana?

944. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FARIZ SALMIN [01:25:45]

Siap, izin, Yang Mulia. Itu semua tergantung dari pertimbangan dari Hakim.

945. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:49]

Oke. Kita yang menilai, ya.

946. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FARIZ SALMIN [01:25:51]

Siap, Yang Mulia.

947. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:51]

Maksud saya supaya ter ... Termohon dan Pihak Terkait itu meresponsnya juga jelas.

948. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FARIZ SALMIN [01:25:57]

Ya, Yang Mulia.

949. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:58]

Ya. Oke Terus kemudian Kabupaten Morowali, bagaimana petitumnya?

950. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI [01:26:13]

Untuk Morowali 2, Provinsi Sulawesi Tengah, Yang Mulia.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohonan untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Selatan, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2020 ... 2024, diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB ... Waktu Indonesia Barat sepanjang daerah pemilihan Morowali 2. Untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah.

951. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:01]

Ya, ini juga sama ini. Jadi yang diminta PSU seluruh Dapil Morowali 2. Berarti sama ini, ya. Ya, Sudah cukup?

952. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI [01:27:08]

Sudah cukup, Yang Mulia, untuk dipertimbangkan.

953. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:18]

Cukup, ya. Yang Mulia? Prof. Anwar? Cukup? Baik.

Jadi, itu petitumnya sudah dibacakan dan persoalan-persoalan, ini tidak ber ... apa ... tidak mempersoalkan angka-angka tapi mempersoalkan ada pelanggaran administrasi. Karena pelanggaran administrasi di tempat tertentu tapi dia mintanya seluruh dapil daerah itu untuk dilakukan PSU.

Baik. Saudara, mengajukan Bukti untuk Dapil Buol 3, P-1 sampai dengan P-16.

954. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI [01:27:55]

Ya, Yang Mulia. P-1 sampai P-16.

955. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:57]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Dapil Morowali 2, P-1 sampai dengan P-29.

956. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI [01:28:04]

Ya, Yang Mulia.

957. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:04]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Sudah lengkap.

Ada lagi yang Akan disampaikan? Cukup?

958. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI [01:28:10]

Cukup, Yang Mulia.

959. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:11]

Cukup, baik. Terima kasih.

Ya. Begini, Para Pihak baik Pemohon, Terkait, dan Termohon, ini ada kepentingan yang tidak dapat diwakilkan karena harus ke toilet dan di persidangan tidak disediakan kateter, jadi terpaksa harus ke toilet.

Ya, maka diskors lima menit. Kalau yang mau ke toilet, disilakan, tapi kalau tidak diharapkan hanya istirahat lima menit, enggak kemana-mana. Ya, baik. Sidang diskors lima menit.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS 15.00 WIB

SKORS DICABUT 15.08 WIB

Baik kita mulai lagi. Skorsing dicabut, sidang terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1X

Ya, tadi mohon saya wakikan ternyata enggak bisa. Panitera pengganti saya tolong diwakili, enggak bisa dia katanya. Sekarang, Perkara Nomor 73. Pemohonnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

960. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:32:30]

Siap, Pak.

961. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:31]

Ya, kemudian ini permohonannya menyangkut banyak dapil. Pihak Terkaitnya PKS, PPP. Per ... Partai Kebangkitan Bangsa dan Gerindra, semua siap, ya? Oke.

Silakan, siapa yang menyampaikan?

962. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:33:21]

Terima kasih, Prof.

963. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:22]

Ya.

964. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:33:24]

Untuk perihal permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya yang ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.00 WIB ... 22.19 WIB. Izin, atas nama Pemberi Kuasa, Ibu Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDI Perjuangan dan Bapak Hasto Kristiyanto selaku Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan. Izin, untuk menyampaikan mengenai materi gugatan terhadap pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tersebut.

Yang pertama, terkait masalah kewenangan Mahkamah Konstitusi, bahwasanya Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU.

965. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:14]

Ya.

966. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:34:14]

Yang kedua, masalah kedudukan hukum Pemohon. Bahwasanya Pemohon adalah salah satu pengurus partai politik yang menjadi peserta pemilu.

967. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:24]

Oke.

968. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:34:24]

Masalah tenggang waktu. Bahwasanya permohonan ini diajukan pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.15 WIB dan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonannya.

969. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:35]

Ya. Yang (...)

970. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:34:36]

Terkait (...)

971. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:36]

Dipersoalkan mana saja?

972. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:34:38]

Terkait pokok permohonan, setidaknya disini terdapat enam dapil, Prof.

973. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:43]

Ya.

974. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:34:43]

Enam dapil diantaranya adalah 2 untuk Dapil DPRD Provinsi Jambi, selebihnya 4 dapil di ... untuk DPRD Kabupaten yang tersebar di Provinsi Jambi.

Pertama untuk pengisian DPRD Provinsi Jambi, daerah pemilihan Jambi 2, Kabupaten Muaro Jambi ... Kabupaten Batanghari dan Muaro Jambi, dimana dalil disini kami mendalilkan adanya TPS pada TPS 2 dan TPS 4, tiga orang yang terdaftar dalam DPT di masing-masing TPS menggunakan hak suara yang sama di TPS 02 dengan TPS 04 dalam hari yang sama.

975. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:23]

Oke, jadi ada berapa orang?

976. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:35:25]

Ada tiga di TPS 02.

977. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:27]

Tiga orang di TPS 02.

978. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:35:30]

Yang juga mencoblos di TPS 04 di Desa Kembang Seri, Kecamatan Waru Subuhulu.

979. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:35]

TPS 04 mencoblos juga?

980. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:35:37]

Ya.

981. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:38]

Tiga orang ini?

982. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:35:39]

Ya, tiga orang itu mencoblos di TPS yang berbeda, Prof.

983. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:41]

Jadi, dia melakukan pencoblosan dua kali?

984. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:35:44]

Ya, dua kali, Prof.

985. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:45]

Di TPS yang berbeda, ya?

986. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:35:47]

Ya, Prof.

987. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:48]

Oke, itu cuma orangnya tiga?

988. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:35:50]

Tiga, Prof.

989. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:00]

Oke.

990. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:35:51]

Terus di TPS 02, Desa kembang ... Desa Sungai Rengas, itu terdapat adanya pemilih yang menggunakan hak suaranya tidak

berdasarkan sebagaimana mestinya, Prof. Karena ada satu orang pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan yang menggunakan lima surat suara. Sementara semestinya pemilih tersebut hanya mendapatkan tiga surat suara berdasarkan PKPU Nomor 25 Tahun 2023, Prof.

991. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:20]

Ya.

992. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:36:22]

Terus ada lagi di TPS 02, Desa Olak Kemang, di mana terdapat pemilih DPTb, pemilih tambahan atas nama Dedi Setiawan, yang juga mendapatkan, menggunakan lima surat suara. Padahal pemilih tersebut ber ... berada di DPT atau terdaftar dalam DPT kabupaten lainnya, yang seyogianya hanya mendapatkan tiga surat suara, Prof.

993. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:48]

Oke.

994. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:36:49]

Terus di TPS 03, Desa Rantau Puri, juga terdapat kesalahan dari KPPS 03 yang mengunjungi pemilih yang tidak berada di ... yang tidak mengikuti pemilihan ke TPS. Karena KPPS mengunjungi rumah sakit untuk pemilih tertentu, Prof.

995. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:09]

Ya.

996. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:37:11]

Terus, sementara itu di Kabupaten Muaro Jambi nya, itu di TPS 12, TPS 18, TPS 33, TPS 19, TPS 10, TPS 14, TPS 13, dan di TPS 28, serta di TPS 08, itu terdapat seseorang yang telah berwenang, atau bisa dapat menggunakan hak pilihnya, tapi tidak diperbolehkan menggunakan hak pilihnya pada waktu perhitungan ... pada waktu pemungutan suara.

997. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:41]

Dengan alasan apa, katanya?

998. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:37:43]

Dengan alasan, ada berbagai macam alasan, Prof. Ada yang tidak membawa panggilan atau bahkan ada yang tidak terdaftar dalam DPT, padahal mereka sudah memiliki e-KTP setempat, berdasarkan e-KTP setempat, yang sepertinya juga bisa dikategorikan sebagai daftar pemilih khusus (...)

999. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:02]

Oke.

1000. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:38:02]

Di dalam TPS yang bersangkutan.

1001. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:04]

Dari persoalan-persoalan itu, ada penghitungan suaranya?

1002. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:38:09]

Izin, Prof?

1003. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:10]

Ya, dari persoalan-persoalan tadi (...)

1004. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:38:14]

Ya.

1005. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:14]

Itu berpengaruh pada suara?

1006.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:38:16]

Ya, dari persoalan-persoalan tadi, terdapat pengaruh dalam perhitungan ... terdapat pengaruh dalam suara ... suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, Prof.

1007.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:28]

Pihak Terkaitnya PKS, ya?

1008.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:38:30]

PKS, Prof.

1009.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:31]

Ya, coba disampaikan penghitungan suaranya.

1010.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:38:64]

Perhitungan suaranya, bahwasanya menurut Pemohon, itu suara dari Partai Keadilan Sejahtera itu=19.193, Prof. Sementara, menurut Termohon itu=19.245, Prof.

1011.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:52]

Oke, sedangkan PDIP-nya dapat berapa?

1012.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:38:53]

Sedangkan PDIP-nya, menurut Pemohon itu=57.623, Prof.

1013.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:00]

Oke.

1014.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:39:00]

Sementara, menurut Termohon itu=575.080, Prof.

1015.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:04]

Ada selisih suara berapa, berarti?

1016.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:39:06]

Ada 52 selisih suara, Prof.

1017.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:08]

Oke, ini sudah di Dapil Jambi 2, ya?

1018.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:39:14]

Jambi 2, Prof.

1019.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:14]

Ya, permintaannya di petitum apa?

1020.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:39:16]

Permintaan terhadap Jambi 2 ini untuk melakukan PSU di beberapa TPS yang sebagaimana disebutkan tadi, Prof.

1021.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:23]

Ya, itu di petitumnya ada TPS-TPS yang disebutkan?

1022.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:39:28]

Izin, Prof. Di petitum ada terdapat di angka 5.3, Prof.

1023.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:32]

Nanti dibacakan, ya?

1024.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:39:34]

Siap, Prof.

1025.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:34]

Oke, sekarang kita bergeser ke Dapil Jambi 3.

1026.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:39:40]

Untuk Dapil Jambi 3, Prof. Itu terjadi (...)

1027.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:42]

Sarolangun dan Merangin, ya?

1028.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:39:44]

Sarolangun dan Kabupaten Merangin.

1029.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:47]

Ya.

1030.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:39:48]

Itu terjadi selisih suara 243 antara PPP dan Partai PDI, Prof.

1031.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:55]

Oke.

1032.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:39:55]

Perjuangan.

1033.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:56]

Kenapa bisa ada selisih itu?

1034.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:39:57]

Karena ... izin, Prof. Untuk menyampaikan bahwasanya telah ter ... terjadi (...)

1035.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:01]

Ini ... anu ... suasananya kayak sama di kampus ini, Saya disebut Prof, terus ini. Padahal kalau di sini saya disebut Yang Mulia.

1036.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:40:08]

Izin, Yang Mulia.

1037.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:11]

Tapi enggak apa-apa, Saya lama enggak disebut, Prof, soalnya. Ya, tapi enggak apa-apa. Karena memang sebetulnya enggak, Mulia. Ya, silakan diteruskan.

1038.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:40:23]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

1039.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:25]

Ya, Prof. saja lah. Silakan.

1040.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:40:33]

Izin, melanjutkan, Prof.

1041.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:35]

Ya (...)

1042.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:40:35]

Bahwasanya (...)

1043.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:38]

Enggak apa-apa, udah langsung aja Prof, ya.

1044.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:40:40]

Ya (...)

1045.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:40]

Atau menyebut Mas saja boleh.

1046.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:40:44]

Karena Ketua dengan Hakim menjelis Profesor semuanya, Prof.

1047.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:47]

Ya, makanya itu. Ya, boleh, silakan.
Terserah (...)

1048.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:40:51]

Melanjutkan, Prof, bahwasanya telah (...)

1049.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:53]

Asal jangan, Dik, lah. Ayo, silakan.

1050.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:40:58]

Bahwa telah terjadi perubahan perolehan suara, Prof, pada 86 TPS yang ada di Kabupaten Sarolangun antara Pemohon (...)

1051.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:06]

Berapa? Berapa TPS?

1052.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:41:07]

86 TPS, Prof.

1053.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:09]

86 TPS?

1054.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:41:10]

Ya.

1055.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:10]

Yang tersebar di kecamatan apa saja?

1056.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:41:12]

Di kecamatan (...)

1057.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:14]

Bisa disebutkan.

1058.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:41:16]

Jadi terjadi perubahan ini, Prof. Bukan hanya persoalan antara PPP ... perubahan ke PPP saja. Akan tetapi terjadi juga perubahan atau perpindahan suara dari PKN yang ke Partai Golkar juga, Prof.

1059.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:28]

Oke.

1060.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:41:28]

Sebanyak 2.305 suara.

1061.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:30]

Oke.

1062.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:41:30]

Dan dari PKN ke Partai PPP ada menaikkan suara PPP sebanyak 211 suara, Prof.

1063.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:38]

Oke.

1064.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:41:38]

Sehingga pada rapat Pleno perpindahan suara tersebut telah dikembalikan pada ke jumlah suara asal pada waktu di Pleno Tingkat Provinsi Jambi.

1065.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:50]

Oke.

1066.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:41:51]

Kesimpulan akhirnya, Prof (...)

1067.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:53]

Ya.

1068.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:41:53]

Terhadap Dapil 2 ini bahwasanya ada rekomendasi lisan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Jambi (...)

1069.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:02]

Rekomendasi lisan?

1070.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:42:03]

Ya, secara lisan. Yang kami buktikan dengan video rekaman pada saat Pleno, Prof.

1071.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:07]

Ya.

1072.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:42:08]

Di mana Bawaslu membuat saran perbaikan untuk membaca ulang C.Hasil untuk DPRD Provinsi Jambi di Dapil 3 (...)

1073.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:17]

Sarolangun (...)

1074.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:42:17]

Khusus di Kabupaten Sarolangun.

1075.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:19]

Oke.

1076.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:42:20]

Namun (...)

1077.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:20]

Nanti di anu, ya, respons

1078.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:42:22]

Ya.

1079.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:22]

Ada rekomendasi lisan ini, gimana?

1080.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:42:25]

Namun saran perbaikan tersebut yang disampaikan secara lisan tersebut tidak dilaksanakan untuk seluruh TPS-nya. Mungkin itu yang menjadi dasar di Dapil 3, Prof.

1081.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:35]

Ya. Terus permintaannya apa?

1082.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:42:37]

Permintaan terhadap Dapil 3 ini untuk melakukan pem ... perhitungan suara ulang, Prof. Untuk dihitung kembali surat suara yang berdasarkan (...)

1083.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:45]

Ya, penghitungan suara ulang (...)

1084.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:42:45]

Ya, rekomendasi, Prof.

1085.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:48]

Nanti di ... anu ... dipetitemnya ada, ya?

1086.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:42:50]

Ada, Prof.

1087.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:51]

Oke.

Dah, sekarang yang ke ... Merangin.

1088.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:42:56]

Yang DPRD Kabupaten Merangin, izin menyampaikan bahwasanya di TPS-4 Muara Delang ada perbedaan signifikan antara jumlah pengguna hak pilih, DPT, berdasarkan salinan formulir dengan jumlah daftar hadir pemilih berdasarkan Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap. Dimana Kecamatan Muara Delang ini berdasarkan Formulir Model C Daftar Pemilih Tetap sebanyak 219 orang yang mengisi daftar hadir saat pemungutan suara. Sementara pengguna hak pilih yang ada DP ... di DPT yang diisi berdasarkan salinan model C sejumlah 232 orang. Setidaknya ada 13 orang pemilih di TPS ini yang tanpa dasar hukumnya tapi terjadi penambahan suara bagi partai tertentu, Prof.

1089.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:45]

Oke. Terus?

1090.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:43:48]

Di TPS 1 Kelurahan Pasar Rantau Panjang telah terjadi penggunaan hak pilih lebih dari satu kali, Prof.

1091.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:56]

Oke, ini coblos 2, lebih dari 1 kali.

1092.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:43:59]

Ya, mencoblos di tempat yang berbeda.

1093.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:01]

Berbeda.

1094.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:44:02]

Pemilih atas nama Hasbullah Hadi, dengan nomor induk sekian, sekian, sekian yang terdaftar di TPS 16, Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Tabir.

1095.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:10]

Dia juga nyoblos di TPS 1?

1096.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:44:12]

Dia menyoblos di TPS 1, Prof.

1097.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:13]

Kelurahan. Itu hanya satu orang, ya?

1098.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:44:14]

Nah, ya.

1099.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:16]

Satu orang nyoblos dua kali.

1100.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:44:18]

Ya, nyoblos dua kali, Prof.

1101.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:19]

Di tempat berbeda?

1102.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:44:20]

Ya.

1103.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:21]

Oke, terus?

1104.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:44:22]

Terus, bahwasanya juga ini telah dila ... dilaporkan juga ke Bawaslu. Dan hasil dari koreksi Bawaslu RI menyatakan terdapat

pelanggaran terhadap prosedur dan tata cara proses dan mekanisme terhadap pemilihan di ... yang ada terjadi di TPS ini, Prof. Namun (...)

1105.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:40]

Permintaannya apa ini?

1106.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:44:42]

Gimana, Prof? Permintaannya untuk melakukan pemungutan suara ulang.

1107.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:43]

PSU.

1108.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:44:43]

Ya.

1109.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:44]

Karena ada yang nyoblos dua kali?

1110.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:44:47]

Ya, Prof.

1111.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:48]

Terus, ini kalau suaranya, perhitungan suaranya gimana? Ada selisih antara Partai Demokrasi Perjuangan (...)

1112.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:44:50]

Ada, Prof.

1113.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:43]

Dan PAN? 33 itu?

1114.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:44:55]

Untuk selisih suaranya 33, Prof.

1115.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:02]

Oke, coba disebutkan angka-angkanya.

1116.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:45:04]

Untuk Partai Amanat Nasional, menurut Pemohon itu 3.183. Sementara menurut Termohon itu 3.216.

1117.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:14]

Oke.

1118.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:45:16]

Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menurut Pemohon itu 3.216. Dan menurut Termohon ada 3.183.

1119.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:25]

Baik.

1120.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:45:26]

Terjadi 33 selisih suara, Prof.

1121.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:27]

Ini pemungutan suara ulang di TPS-TPS di petitemnya disebut, ya?

1122.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:45:32]

Disebut, Prof.

1123.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:33]

Baik, sekarang kita geser ke Dapil Muaro Jambi 3 dan Merangin, untuk DPRD Kabupaten.

1124.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:45:45]

Untuk DPRD Kabupaten Merangin, sama, Prof. yang 33 tadi.

1125.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:49]

Ya.

1126.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:45:50]

Untuk perolehan kursi DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Dapil 3, Kecamatan Sungai Gelam, Prof. Ada terjadi selisih, angka yang menurut Pemohon itu suara dari PKB ada 3.757. Sementara menurut Termohon itu 4.383, Prof.

1127.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:09]

Ya.

1128.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:46:10]

Sementara PDI menurut Termohon=3.757. Sementara menurut Pemohon itu 4.348, Prof.

1129.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:16]

Ya.

1130.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:46:17]

Ada terjadi selisih 33.

1131.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:18]

33.

1132.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:46:19]

Ya. Bahwa mengenai persoalan di sini, Prof. Sama halnya di 9 TPS yang sebelumnya disebutkan, pada waktu DPRD provinsi Dapil 2 Provinsi tadi, Prof.

1133.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:26]

Yang tadi, ya. Oke sama. Nyoblos 2 Kali itu tadi?

1134.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:46:33]

Ya, Prof.

1135.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:34]

Oke.

1136.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:46:35]

Izin, Prof (...)

1137.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:36]

3 orang yang nyoblos 2 kali kan itu?

1138.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:46:37]

Ya.

1139.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:38]

Sama, ya.

1140.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:46:39]

Izin, untuk terhadap halaman 17, Prof. Izin di posita angka 4.18.

1141.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:46]

Ya?

1142.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:46:47]

Itu untuk yang strip 1 sampai strip 5-nya mohon untuk dihapuskan saja, Prof.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:53]

Ya.

1143.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:46:55]

Terus sejumlah pilihnya di ... tertulis 3.615. Mohon di Renvoi menjadi 2.312 pemilih, Prof.

1144.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:02]

Ya. Nanti kita nilai boleh nggak itu (...)

1145.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:47:07]

Ya, Prof.

1146.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:09]

Renvoi itu. Terus sekarang apa yang diminta PSU?

1147.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:47:12]

PSU, Prof.

1148.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:13]

Karena sama, ya?

1149.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:47:14]

Ya, Prof.

1150.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:15]

Dalilnya sama dengan yang di depan tadi.
Sekarang Dapil 4 Kerinci.

1151.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:47:19]

Dapil 4 Kerinci, Prof. Terdapat beberapa orang yang pada waktu hari pemilihan, sedang bekerja menjadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri, Prof.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:30]

Berapa orang itu?

1152.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:47:32]

Yang tercatat di kami itu se ... masing-masing TPS lebih dari 10, Prof.

1153.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:38]

Masing-masing TPS lebih dari 10?

1154.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:47:39]

Ya, karena ada 4 TPS yang kami gunakan.

1155.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:42]

Gimana kalau itu anu ... tenaga kerja di luar negeri?

1156.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:47:45]

Gimana, Prof? Izin.

1157.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:46]

Kok tahu, kalau dia TKI di luar negeri?

1158.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:47:49]

Kami ... mendapatkan informasi dari perangkat desa yang sekaligus juga, nantinya kami juga akan mencoba mengkoordinasi ke imigrasi, Prof.

1159.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:58]

Oke. Tapi dia ternyata ... anu ... menggunakan hak pilihnya?

1160.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:48:01]

Ternyata menggunakan hak pilihnya dengan menandatangani absen.

1161.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:04]

Itu di mana saja? Di TPS mana aja?

1162.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:48:05]

Di TPS 1, Desa Pendung, Talang Genting. Terus di TPS 2, Desa Pendung, Talang Genting. Dan TPS 3 serta TPS 4, Pendung, Talang Genting, Prof.

1163.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:15]

Oke.

1164.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:48:15]

Kecamatan Danau Kerinci.

1165.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:17]

Oke.

1166.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:48:20]

Lanjutnya, Prof.

1167.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:20]

Ya.

1168.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:48:21]

Ada di TPS (...)

1169.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:24]

TPS 1, Danau Kerinci, ya?

1170.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:48:27]

Di TPS 1, Desa Sleman, Danau Kerinci, Prof.

1171.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:31]

Desa Sleman?
Terus, yang (...)

1172.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:48:32]

Terdapat 200 pemilih yang terdaftar dalam DPT. Sementara yang menggunakan hak pilih yang berasal dari DPT berdasarkan salinan C.Hasil sejumlah 216 orang, Prof. Namun, apabila disandingkan dengan formulir C.Daftar Hadir, setidaknya terdapat penambahan 4 suara berdasarkan jika dikombinasikan antara daftar hadir dengan formulir C.Hasil, Prof.

1173.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:56]

Ya. Terus yang Kerinci, TPS 5 gimana itu?

1174.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:49:00]

Di TPS 5, Kota Tengah. Terdapat 237 pemilih yang terdaftar dalam DPT. Namun yang menggunakan hak suaranya adalah sebanyak 155 orang. Namun faktanya, dalam formulir C.Hasil Kabupaten/Kota, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan DPT sebanyak 224 pemilih, Prof. Sehingga terdapat penambahan 63 pemilih yang tidak mengisi daftar hadirnya, namun terdapat dalam formulir C.Hasil pemilihan, Prof.

1175.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:31]

Itu berakibat perolehan suara yang terakhir gimana itu?

1176.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:49:34]

Di sini terhadap akibatnya (...)

1177.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:39]

Antara Gerindra dan PPP

1178.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:49:41]

Antara Gerindra dengan PPP, Pemohon ... menurut Pemohon, suara Partai Gerindra adalah 200 ... 2.366, sementara untuk Partai PDI menurut Pemohon adalah 2.807, sementara (...)

1179.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:55]

Eenggak, kenapa eenggak kebalik itu?

1180.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:49:57]

Oh, mohon maaf, Prof. Menurut Termohon=2.807, Sementara Partai PDI menurut Termohon=2.366, menurut Termohon ... Pemohon itu 2.807, Prof.

1181.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:09]

Oke. Jadi ada selisih 441, ya?

1182.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:50:12]

Ya, Prof.

1183.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:14]

Oke. Mintanya pemungutan suara ulang.

1184.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:50:17]

Minta pemungutan suara ulang, Prof.

1185.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:19]

Ya, karena ada 10 orang yang tidak ... di luar negeri kok menggunakan hak pilihnya.

1186.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:50:24]

Lebih dari 10 orang, Prof. 10 orang per TPS (...)

1187.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:26]

Ya, 10 orang per TPS?

1188.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:50:28]

Ya, Prof.

1189.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:28]

Oke. Sekarang yang ke-6, Dapil Kerinci.

1190.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:50:31]

Dapil Kabupaten Kerinci 5, itu dalilnya juga sama, Prof. Ada beberapa yang tidak layak menggunakan hak pilihnya, namun dalam faktanya menggunakan hak pilihnya.

1191.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:41]

Kenapa tidak layak?

1192.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:50:43]

Karena mereka tidak berada di lokasi dan ada juga yang telah meninggal, tapi menggunakan hak suaranya, dianggap hadir di dalam TPS yang bersangkutan, Prof.

1193.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:50]

Oke. Orang mati?

1194.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:50:52]

Ya, Prof.

1195.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:53]

Arwahnya yang nyoblos?

1196.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:50:55]

Wallahualam. Sehingga menurut ... sehingga terdapat persandingan perolehan suara, menurut Pemohon itu 2.016, suara Partai Amanat Nasional dan menurut Termohon itu suara Partai Amanat Nasional=2.482, Prof.

1197.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:56]

Oke.

1198.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:51:10]

Sementara untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menurut Pemohon itu 2.482, sementara menurut Termohon ada 2.016, Prof. Jadi terjadi selisih 466, Prof.

1199.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:22]

Oke. Permintaannya?

1200.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:51:24]

Petitum, Prof.

1201.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:25]

Enggak, permintaan ini dulu apa ini?

1202.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:51:21]

PSU, Prof. Untuk melakukan PSU (...)

1203.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:27]

PSU juga?

1204.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:51:27]

Ya, Prof.

1205.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:29]

Oke. Sekarang petitumnya.

1206.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:51:31]

Untuk Petitumnya, Prof.

Yang pertama, tentu mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Prof.

1207.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:38]

Ya.

1208.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:51:39]

Yang kedua, membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, dan seterusnya.

1209.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:46]

Ya.

1210.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:51:48]

Sepanjang mengenai untuk pemilihan anggota.

DPRD Provinsi Jambi, untuk Dapil Jambi 2, Kabupaten Batanghari, dan Kabupaten Muaro Jambi.

DPRD Provinsi Jambi untuk daerah pemilihan Jambi 3, Sarolangun dan Kabupaten Merangin.

DPRD Kabupaten Merangin, untuk Daerah Pemilihan Merangin 2, Kecamatan Tabir, Kecamatan Tabir Ulu, Tabir Selatan, Tabir Ilir, Tabir Timur, Margo Tabir, Tabir Lintas, dan Tabir Barat.

DPRD Kabupaten Muaro Jambi untuk Daerah Pemilihan Muaro Jambi 3, Kecamatan Sungai Gelam.

DPRD Kabupaten Kerinci Daerah Pemilihan Kerinci 4, Kecamatan Danau Kerinci, Batang Merangin, Tanah Cogok, dan Kecamatan Sitingau Laut.

DPRD Kabupaten Kerinci Daerah Pemilihan Kerinci 5, Daerah Pemilihan Kecamatan Gunung Raya, Bukit Kerman, Keliling Danau, dan Danau Kerinci Barat.

Izin Prof., ada terbuat 2 kali Daerah Pemilihan Kerinci 5-nya, Prof. Mohon izin, untuk direnvoi, Prof.

1211.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:42]

Oke. Ini (...)

1212.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:52:44]

Pemilihan Kerinci 5, Daerah Pemilihan Kerinci 5, 2 kali tersebut, Prof.

1213.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:45]

Kerinci 5 nya ada 2, ya. Ya.

1214.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:52:49]

Terus.

- 5.3 Petitemnya. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk pemilihan DPRD Provinsi Jambi, Daerah Pemilihan Jambi 2 Kabupaten Batang Hari, dan Kabupaten Muaro Jambi, pada TPS 02, TPS 04 Desa Kembang Seri, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, TPS 02 Desa Sungai Rengas, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, TPS 02 Desa Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, TPS 03 Desa Rantau Puri, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, dan TPS 20, TPS 28, TPS 33, TPS 18, TPS 19, TPS 10, TPS 14, TPS 31, dan TPS 08 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5.4 Memerintahkan kepada Termohon untuk menghitung surat suara ulang untuk pemilihan DPRD Provinsi Jambi, Daerah Pemilihan Jambi 3 Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Merangin, di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Sarolangun.
- 5.5 Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk pemilihan DPRD Provinsi Jambi, Daerah Pemilihan Jambi 3 pada TPS 04 Desa Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, TPS 01 Kelurahan Pasar Rantau Panjang, dan TPS 16 Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5.6 Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk pemilihan DPRD Kabupaten Merangin, Daerah Pemilihan Merangin 2 Kecamatan Tabir, Tabir Ulu, Tabir Selatan, Tabir Ilir, Tabir Timur, Margo Tabir, dan Tabir Barat, pada TPS 04 Desa Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, TPS 01 Kelurahan Pasar Rantau Panjang, dan TPS 16 Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5.7 Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk pemilihan DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Daerah Pemilihan Muaro Jambi 3, Kecamatan Sungai Gelam, TPS 20, TPS 28, TPS 33, TPS 18, TPS 19, TPS 10, TPS 14, TPS 31, dan TPS 08 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Maura Jambi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 5.8 Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk pemilihan DPRD Kabupaten Kerinci, Daerah Pemilihan Kerinci 4 DPRD Kabupaten Kerinci, dan daerah pemilihan Kerin ... Kecamatan Batang Merangin, Tanah Cogok, dan Kecamatan Sitinjau Laut, pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 Desa Pendung Talang Genting, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, TPS 01 Desa Sleman, Kecamatan Danau Kerinci, serta TPS 4 ... TPS 5 Desa Koto Tengah, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5.9 Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk pemilihan DPRD Kabupaten Kerinci Daerah Pemilihan Kerinci 5, Gunung Raya, Bukit Kerman, Keliling Danau dan, Danau Kerinci Barat, pada TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 04 Desa Koto Dian Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci, dan TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5.10 Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Prof.

1215.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:36]

Terima kasih. Prof. Enny, ada yang akan disampaikan? Cukup, ya? Prof. Anwar? Cukup, ya?

Ada beberapa hal yang perlu saya minta klarifikasi dan sebelum mengesahkan bukti. Ini ada 2 Surat Kuasa, ya. Seperti tadi (...)

1216.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:56:56]

Baik, Prof.

1217.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:57]

Ya. Ada yang 41 Surat Kuasa dan ada yang 9 saja ada 2 Surat Kuasa. Itu, yang Surat Kuasa 41 tadi yang mau dipakai, tapi yang 41 itu 8 orang belum tanda tangan.

1218.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:57:15]

Ya, Prof.

1219.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:15]

Kalau begitu dua-duanya dipakai, ya?

1220.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:57:17]

Dua-duanya dipakai, Prof.

1221.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:18]

Supaya lengkap, ya. Kemudian nanti ... anu, diputuskan bahwa surat kuasanya berlaku dua-duanya.

1222.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:57:27]

Baik, Prof.

1223.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:28]

Ya. Kemudian mengenai bukti, ini ada beberapa hal yang perlu dibetulkan, di ... anu, dibenahi, ya.
Buktinya saya sahkan P-1 sampai dengan P-76, benar?
Mengajukan itu.

1224.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:57:47]

Benar, Prof.

1225.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:48]

Benar. Tapi ada beberapa yang tidak dapat disahkan, karena apa? Karena belum jelas bukti itu.
Nanti tolong dihubungi Kepaniteraan di bawah, ya.

1226.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:58:00]

Izin, Prof.

1227.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:00]

Ya?

1228.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:58:01]

Apakah dapat menyampaikan di dalam persidangan ini, Prof?

1229.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:03]

Apanya?

1230.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:58:04]

5 bukti yang belum kami serahkan semua.

1231.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:06]

Enggak, ini masih banyak kok. Nanti di bawah saja.

1232.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:58:10]

Siap, Prof.

1233.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:11]

Ya. Jadi, ini sudah disahkan P-1 sampai dengan P-76, kecuali P-4, P-8, ini yang bermasalah, masih bermasalah. P-4, P-8, P-12, P-41, P-49, P-50, P-51, P-52, P-54, P-60, P-61, dan P-71. Itu catatannya. Makanya enggak mungkin bisa dibetulkan di persidangan.

1234.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:58:42]

Baik, Prof.

1235.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:42]

Nanti ke bawah, menghubungi Panitia Pengganti untuk dilakukan pembetulan, ya.

1236.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:58:49]

Baik, Prof.

1237.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:50]

Jadi, saya sahkan P-1 sampai dengan P-76, kecuali yang saya sebutkan tadi, belum bisa disahkan.

1238.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:58:58]

Siap, Prof.

1239.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:59]

Ya, disahkan.

KETUK PALU 1X

Terima kasih. Ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup?

1240.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:59:00]

Cukup, Prof.

1241.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:01]

Baik.

1242.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ADITHIYA DIAR [01:59:03]

Terima kasih.

1243.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:03]

Terima kasih.

Ya, apa?

1244.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDY SUGIARTO [01:59:04]

Dari Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera. Mohon untuk mengajukan tambahan surat kuasa.

1245.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:26]

Oke, mana? Sudah ada?

1246.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDY SUGIARTO [01:59:04]

Terima kasih.

1247.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:34]

Ya, terima kasih. Diserahkan, Panitera, di belakang ini. Berikutnya, sekarang Perkara 67. Perkara 67 dari Partai NasDem.

1248.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-01-05-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [01:59:55]

Ya.

1249.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:55]

Yang mau nyabut?

1250.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-01-05-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [01:59:57]

Ya.

1251.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:57]

Ya, segera dicabut.

1252.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-01-05-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [01:59:59]

Ya.

1253.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00:00]

Silakan. Jangan pidato politik, ya, nyabutnya.
Silakan.

1254.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67-01-05-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FERDIAN SUTANTO [02:00:09]

Terima kasih, Majelis. Kami dari Partai NasDem.

Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi c.q Majelis Hakim Konstitusi yang memiliki dan mengadili Perkara ini. Perkara Nomor 67-01-05-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Perkenankan kami yang bertanda tangan di bawah ini, Ferdian Sutanto, advokat dari DPP Badan Advokasi Hukum NasDem. Berkantor di Jalan RP. Soeroso, Nomor 42-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat. Atas nama pemberi kuasa, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan ini menyam ... menyampaikan pencabutan Permohonan Perkara Nomor 67 dan seterusnya. Bahwa kami telah mendaftarkan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang Provinsi Jambi kabupa ... Dapil Kabupaten Sarolangun 2. Bahwa kami mohon pencabutan Perkara Nomor 67 dan seterusnya, sebelum dilakukan jawaban Termohon maupun diberikan keterangan Pihak Terkait.

Demikian pencabutan Permohonan diajukan atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim Konstitusi kami haturkan terima kasih.

1255.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:41]

Baik. Jadi ini surat pencabutan kita terima, nanti akan kita laporkan di Sidang RPH Pleno. Jadi masih ... Anda harus masih tetap mengikuti persidangan, ya, karena belum dikabulkan. Tiga orang enggak bisa mengabulkan. Harus sembilan orang karena yang memutuskan itu ... meskipun kita tiga orang mewakili dari RPH Pleno, tapi kita hanya menerima, nanti kita akan laporkan.

Oleh karena itu, masih mengikuti persidangan sampai diputuskan, ya. Kalau saya bertiga mengatakan, "Sudah enggak bisa, enggak usah ikut," itu artinya saya mendahului vonisnya. Permohonan pencabutan itu bisa dikabulkan, bisa juga tidak dikabulkan, ya. Tapi nanti akan dipertimbangkan di Rapat Pengusahaan Hakim, ya, gitu.

Suratnya diserahkan!

Petugas tolong diambil!

Ya, terima kasih, ya.

Ada lagi yang mau nyabut? Ini saya tawarkan, kok.

Sekarang PPP. PPP itu juga ada yang bagian yang dicabut, ya. Oke. PPP itu ada dua ... sebentar. PPP itu ada dua permohonan dalam satu permohonan yang berkenaan dengan ini Partai Golkar ... apa ... Pihak Terkaitnya, ya. Baik.

Ya, PPP ada Permohonan yang di DPR dan ada yang di DPRD, ya?

1256.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [02:03:51]

Betul, Yang Mulia.

1257.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:53]

Yang di DPR tetap jalan. Yang di DPR ada ... yang DPRD ada yang dicabut, ya?

1258.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [02:03:59]

Ya, Yang Mulia

1259.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:00]

Suratnya yang pencabutan dibacakan dulu.

1260.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [02:04:05]

Mohon izin, Yang Mulia. Sudah kami masukkan di (...)

1261.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:09]

Yang tertanggal 22 April 2024, ya?

1262.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [02:04:12]

Ya, Yang Mulia.

1263.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:14]

Oke. Penarikan atau pencabutan Permohonan Provinsi Jambi sepanjang hanya untuk DPRD Provinsi Jambi, Dapil Jambi 1, dan anggota DPRD Kota Jambi, Dapil Kota Jambi 1, Kota Jambi 2, Kota Jambi 3, Kota Jambi 4, dan Kota Jambi 5?

1264.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [02:04:35]

Betul, Yang Mulia.

1265.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:36]

Oke. Kalau begitu ini suratnya sudah diterima, ya, dan sudah disampaikan di dalam persidangan.

Terus, kemudian yang DPR masih, ya? Masih jalan?

1266.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [02:04:48]

Masih tetap.

1267.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:49]

Silakan dibacakan.

1268.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [02:04:50]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Wr. Wb.

1269.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:54]

Walaikumsalam.

1270.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [02:04:57]

Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Izinkan kami dari Kuasa Hukum Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan Permohonan pada Perkara 110, perihal Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya dianggap dibacakan, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Jambi, Provinsi Jambi, konversi PT 4%.

1271.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:31]

Oke. Mahkamah berwenang, ya?

1272.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [02:05:32]

Yang bertandatangan memberikan kuasa (...)

1273.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:34]

Ya, dianggap dibacakan itu.

1274.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [02:05:35]

Dianggap dibacakan.

1275.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:36]

Mahkamah berwenang?

1276.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [02:05:37]

Kewenangan Mahkamah berwenang.

1277.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:39]

Kemudian, tenggang waktunya, masih tenggang waktu?

1278.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [02:05:42]

Masih tenggang waktu, Yang Mulia.

1279.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:43]

Kedudukan, punya kedudukan hukum?

1280.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [02:05:44]

Kedudukan pada tanggal 23 Maret 2024 (...)

1281.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:46]

Ya.

1282.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [02:05:46]

Pukul 19.51 WIB.

1283.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:50]

Oke. Sekarang apa yang dipermasalahkan?

1284.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [02:05:54]

Pokok permohonan secara prinsip permohonan kami semua sama dengan permohonan PPP yang lain untuk konversi parlemen threshold 4%.

1285.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:03]

Ini khususnya di daerah Jambi, ya?

1286.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [02:06:06]

Ini khusus ... betul, Yang Mulia.

1287.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:07]

Provinsi Jambi. Coba dibacakan angkanya.

1288.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [02:06:11]

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 340[sic!] Tahun 2024, perolehan suara Pemohon secara nasional ditetapkan sebagai berikut.

Pada tabel 1, Pemohon Partai Persatuan Pembangunan memperoleh suara 5.878.777 dengan persentase 3,87%. Berdasarkan suara tersebut, Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas parlemen, parlemen threshold sebesar 4%. Sehingga terdapat selisih kekurangan suara sebesar 193,88 suara.

1289.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:44]

Oke. Sekarang yang khusus di Jambi, persoalannya apa?

1290.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [02:06:48]

Khusus di Jambi, itu tertera pada tabel 3, Yang Mulia.

1291.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:52]

Ya.

1292.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [02:06:53]

Bahwa ada terjadi pergeseran suara yang dilakukan oleh Pemohon ... yang kami duga dilakukan oleh Pemohon, tentang ... dari suara Partai Garuda, suara PPP yang pindah ke Partai Garuda.

1293.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:06]

Selisihnya 6.600 itu?

1294.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [02:07:06]

Selisih 6.600, Yang Mulia.

1295.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:10]

Ya. Sekarang, dibacakan PPP versi Termohon dan versi Pemohon berapa?

1296.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [02:07:17]

Bahwa versi Termohon suara Partai Persatuan Pembangunan=58.114.

1297.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:24]

Ya.

1298.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [02:07:27]

Versi Pemohon itu 64.714, Yang Mulia.

1299.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:31]

Oke.

1300.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [02:07:31]

Lantaran suara Partai Garuda (...)

1301.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:33]

Garuda.4%

1302.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [02:07:34]

Versi Termohon itu 6.729.

1303.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:37]

Ya.

1304.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [02:07:37]

Versi Pemohon=129, Yang Mulia.

1305.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:41]

129. Ya, kalau gitu terus Petitemnya?

1306.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [02:07:44]

Petitemnya (...)

1307.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:46]

Ini keberatan ke Bawaslu sudah ada, ya?

1308.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [02:07:48]

Ya, Yang Mulia.

1309.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:49]

Ya, Petitemnya.

1310.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [02:07:51]

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Jambi, Provinsi Jambi, konversi PT 4%.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

1311.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:46]

Ya, baik. Terima kasih.
Prof. Enny, ada yang (...)

1312.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [02:08:49]

Mohon izin satu lagi, Yang Mulia.

1313.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:50]

Ya.

1314.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [02:08:51]

Petitem yang keempat kami belum bacakan.

1315.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:52]

Silakan.

1316.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [02:08:53]

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

1317.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:56]

Oke. Terima kasih.
Prof. Enny. Silakan.

1318.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:09:00]

Baik, ini sedikit saja. Apakah ini sama juga dengan yang sebelumnya bahwa yang selisih 6.600 ini TPS-nya di mana saja itu?

1319.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [02:09:10]

Ya, Yang Mulia. Untuk selisih 6.600 ini karena kita ngumpulkan banyak alat bukti itu (...)

1320.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:09:17]

He eh.

1321.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [02:09:17]

Tersebar kurang lebih dari 400-an TPS di tiga kabupaten di Provinsi Jambi, Yang Mulia.

1322.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:09:22]

Ada buktinya itu, 400 TPS itu?

1323.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [02:09:23]

Ada, Yang Mulia. Sementara kami (...)

1324.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:09:25]

Persandingan suaranya juga ada?

1325.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [02:09:26]

Ada, Yang Mulia.

1326.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:09:28]

Di bukti apa itu? Karena di sini enggak ada buktinya nih.

1327.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [02:09:31]

Itu kami izin untuk masukkan di alat bukti tambahan, Yang Mulia.

1328.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:09:35]

Oh, tambahan. Tapi bukti untuk yang di sini belum ada, ya?

1329.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [02:09:37]

Belum ada, Yang Mulia.

1330.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:09:38]

Oke.

1331.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:43]

Sudah, Prof?
Terima kasih. Saudara, untuk DPRD sudah dicabut, ya?

1332.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [02:09:49]

Ya, Yang Mulia.

1333.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:49]

Berarti buktinya enggak usah disahkan. Tapi untuk DPR RI Buktinya hanya P-1 sama P-2?

1334.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [02:09:55]

P ... P-3, Yang Mulia.

1335.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:56]

Ha?

1336.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [02:09:56]

P-1, P-2, Yang Mulia.

1337.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:57]

Ya, P-1, P-2, ya?

1338.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [02:10:00]

Ya, Yang Mulia.

1339.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:01]

Enggak ada P-3 nya kan?

1340.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [02:10:03]

Ada P-3 nya kalau yang ini, Yang Mulia.

1341.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:05]

P-3 nya yang mohon, permohonannya. Tapi Buktinya P-1 dan P-2.

1342.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [02:10:10]

Kalau ini P-3 nya, Yang Mulia, di permohonan kami itu di SK-2 Surat Keputusan ... Berita Acara itu 2117, Yang Mulia.

1343.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:18]

Oke. Itu ada enggak nanti? Karena kalau enggak ada, ditambahkan nanti.

1344.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [02:10:22]

Baik, Yang Mulia.

1345.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:24]

Kalau di Daftar Alat Bukti P-1 sama P-2 ini, lho. Kalau mau ditambah P-3, ya, nanti setelah selesai sidang. Tambah enggak? Silakan. Yang disahkan ini dulu, dua ini dulu.

1346.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [02:10:37]

Baik, Yang Mulia.

1347.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:38]

P-1 dan P-2 disahkan.

KETUK PALU 1X

Terima kasih. Ada lagi mau disampaikan?

1348.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [02:10:50]

Dari kami cukup, Yang Mulia.
Terima kasih banyak.

1349.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:54]

Terima kasih.
Sekarang berikutnya Perkara Nomor 215. 215, Partai Gerindra yang mengajukan. Pihak terkait ... Apa ini?

1350.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD FATONI [02:11:12]

PKS, Golkar (...)

1351.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:14]

Siapa yang bawa handphone? Jangan dihidupkan, ya! Mengganggu persidangan. Nanti saya suruh keluar nanti. Tolong dimatikan dulu! Ini masih diperingatkan karena sudah sore, kami peringatkan, kalau pagi saya suruh keluar itu, atau kalau malam saya tembak mati. Ya, dimatikan, ya!

Partai Gerindra. Kemudian Pihak Terkaitnya Partai Golongan Karya dan Partai Keadilan Sejahtera. Ada, ya? Oke, silakan.

1352.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD FATONI [02:11:57]

Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

1353.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:05]

Walaikumsalam.

1354.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD FATONI [02:12:17]

Perkenalkan kami, Yang Mulia, yang hadir di sini, saya sendiri Ahmad Fatoni, S.H., M.H., dan rekan saya, Muhammad Sadat, S.H. Dalam hal ini kami mewakili dari Partai Gerindra sebagai Pemohon, terkait dengan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Lampung.

1355.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:26]

Oke.

1356.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD FATONI [02:12:26]

Di Provinsi Lampung ini karena ada 3 dapil, izinkan kami akan membacakan pokok-pokok permohonan secara bergantian, Yang Mulia.

1357.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:34]

Ya, silakan.

1358.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD FATONI [02:12:00]

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan seterusnya, Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 (...)

1359.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:57]

Ya, itu dianggap dibacakan, ya.

1360.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD FATONI [02:13:01]

Selanjutnya terkait dengan Kewenangan Makamah Konstitusi, berwenang, dan selanjutnya dianggap dibacakan.

Kemudian Kedudukan Pemohon, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a, Pemohon adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 2 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bandar Lampung, yaitu Bandar Lampung 3. Pengisian calon anggota DPRD Kota Metro, yaitu Pemilihan Metro Dapil Metro 3. Dan pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat, Daerah Pemilihan Lampung Barat 2.

1361.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:34]

Oke. Jadi berwenang, ya?

1362.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD FATONI [02:13:37]

Untuk tenggang waktu (...)

1363.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:38]

Tenggang waktu, masih.

1364.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD FATONI [02:13:39]

Pemohonan ini ... Permohonan ini kami ajukan pada hari Sabtu, yaitu tanggal 23 Maret, pukul 17.25 WIB.

1365.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:48]

Ya, kedudukan hukum?

1366.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD FATONI [02:13:50]

Kedudukan hukum tadi sudah, Yang Mulia.

1367.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:52]

Partai Politik Nomor Urut 2, ya?

1368.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD FATONI [02:13:53]

Ya.

1369.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:54]

Oke, sekarang Positanya.

1370.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD FATONI [02:13:56]

Kemudian Posita, inti-inti dari Permohonan kami adalah (...)

1371.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:59]

Yang pertama di Dapil Bandar Lampung 3 dulu.

1372.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD FATONI [02:14:03]

Ya. Yang pertama pengisian anggota DPRD Kota Bandar Lampung Daerah Pemilihan Bandar Lampung 3.

1373.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:08]

Ya, persoalannya apa itu? (audio tidak terdengar jelas) ini.

1374.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD FATONI [02:14:12]

Persoalannya adalah bahwa menurut Pemohon ada selisih suara yang disebabkan oleh adanya pemilih dengan cara menggunakan Formulir Model C-1 Pemberitahuan Undangan Memilih, yaitu terjadi di TPS 1 dan TPS 7 Kelurahan Bilabong Jaya, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung.

Kemudian lebih lanjut, di dalam TPS 7 Kelurahan Bilabong Jaya, ada temuan berupa undangan memilih Formulir Model C-1 Pemberitahuan KPU digunakan oleh orang lain, yaitu pemilih bernama Yeremia Ananias menyatakan, tidak pernah menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2004 (...)

1375.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:14:57]

Tapi ternyata ada daftar hadirnya menggunakan hak pilih, ya?

1376.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD FATONI [02:15:00]

Betul.

1377.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:01]

Oke.

1378.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD FATONI [02:15:02]

Dan ini sudah kami sampaikan bukti sebagaimana Bukti P-3 yang kami berikan. Kemudian di dalam daftar hadir, yaitu Bukti P-4. Nama Yeremia tersebut tercantum mendatangi daftar hadir, Yang Mulia.

1379.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:14]

Dan menggunakan hak pilihnya.

1380.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD FATONI [02:15:16]

Siap.

1381.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:21]

Ya, terus apalagi persoalannya?

1382.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD FATONI [02:15:22]

Kemudian ada temuan juga berupa data administrasi pemilih menggunakan hak pilih, yaitu berdasarkan salinan C.Hasil KPU di TPS 7 Kelurahan Bilabong Jaya, suara PKS sebanyak 132 suara. Sedangkan suara Partai Gerindra, yaitu sebanyak 17 suara, berdasarkan Bukti P-6.

1383.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:41]

Oke.

1384.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD FATONI [02:15:43]

Selanjutnya ke halaman 7, Yang Mulia.

1385.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:45]

Ya.

1386.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD FATONI [02:15:46]

Yaitu di TPS 1 Kelurahan Bilabong Jaya, temuannya berupa adanya pemilih siluman menggunakan KTP, yaitu yang bernama Agus Rudiyanto.

1387.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:56]

Pemilih apa itu?

1388.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD FATONI [02:15:58]

Yang kami istilahkan pemilih siluman, Yang Mulia.

1389.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15:59]

Oke.

1390.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD FATONI [02:116:00]

Yaitu yang bernama Agus Rudiyanto menyatakan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS Bilabong Jaya pada hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024.

1391.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:10]

Oke.

1392.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD FATONI [02:16:11]

Tetapi berdasarkan daftar hadir DPK, yaitu Bukti P-8, nama yang bersangkutan ada di Nomor Urut 2, daftar hadir pemilih khusus di TPS 1 Bilabong Jaya.

1393.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:22]

Oke.

1394.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD FATONI [02:16:23]

Pemohon mendapatkan bukti pernyataan Agus Rudiyanto yang diduga namanya dicatut untuk memilih dengan menggunakan KTP di TPS 1 Bilabong Jaya, yaitu Bukti P-9.

1395.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:33]

P-9, ya.

1396.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD FATONI [02:16:34]

Kemudian di halaman 8 poin 2, adanya kejanggalan perolehan suara PKS yang fantastis, di 7 TPS Kelurahan Bilabong Jaya, Kecamatan Langkapura. Berdasarkan kejanggalan tersebut, kami Pemohon dalam hal ini diwakil oleh Bappilu DPD Partai Gerinda Provinsi Lampung, pada tanggal 20 Februari 2004, telah melaporkan kepada Bawaslu Kota Bandar Lampung yang pada pokoknya. Laporan kami adanya dugaan kejanggalan perolehan suara, anomali jumlah pemilih menggunakan KTP dan pemilih pemindahan, serta adanya kesalahan administrasi

penghitungan suara khususnya, di TPS 1 dan TPS 7, Kelurahan Bilabong Jaya.

1397.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:17]

Oke. Di kecamatan Langkapura itu, ya?

1398.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD FATONI [02:17:22]

Betul, Yang Mulia.

1399.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:23]

Ya. Terus?

1400.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD FATONI [02:17:24]

Kemudian lanjut ke halaman 9, Yang Mulia, poin 4.

1401.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:27]

Itu money politic atau apa itu?

1402.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD FATONI [02:17:29]

Ya, ini yang akan saya jelaskan, Yang Mulia.

1403.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:30]

Ya.

1404.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD FATONI [02:17:31]

Bahwa selain adanya pelanggaran sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, ada juga terdapat bentuk kecurangan berupa politik uang, yaitu pembagian uang pada pemilih yang berada dalam lingkup TPS 1 dan TPS 7, Kelurahan Bilabong Jaya. Yang nantinya lebih lanjut akan kami jelaskan oleh saksi kami, Yang Mulia (...)

1405.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:51]

Ya.

1406.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD FATONI [02:17:52]

Kalau misalnya perkara ini berlanjut ke (...)

1407.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:51]

Ya. Kalau enggak, bukti sementara apa ini?

1408.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD FATONI [02:17:55]

Bukti sementara, mungkin ada bukti tambahan nanti, Yang Mulia.

1409.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:58]

Ada bukti tambahan nanti terserah, ya.

1410.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD FATONI [02:17:59]

Terkait ... terkait dengan politik uang (...)

1411.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:59]

Sementara belum ada, ya?

1412.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD FATONI [02:18:02]

Sementara belum ada.

1413.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:03]

Ya. Oke. Ini sementara buktinya ada, tapi nanti kita sahkan, ya.

1414.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD FATONI [02:18:13]

Ya.

1415.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:13]

Terus sekarang yang kedua.

1416.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD FATONI [02:18:17]

Selanjutnya di halaman 11, Yang Mulia.

1417.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:18]

Ya.

1418.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD FATONI [02:18:20]

Bahwa atas peristiwa dan kejadian sebagaimana yang diuraikan di atas dalam proses Pemilihan Umum Tahun 2024, khususnya Pemilihan Anggota Legislatif untuk pengisian Anggota DPRD Kota Bandar Lampung, daerah Pemilihan Bandar Lampung 3, menurut kami sangat jelas dan berakibat mempengaruhi hasil perolehan suara secara keseluruhan, yaitu pada TPS 01 dan TPS 07, Kelurahan Bilabong Jaya, Kecamatan Langkapura.

1419.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:46]

Oke.

1420.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD FATONI [02:18:47]

Maka menurut kami beralasan hukum Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan perolehan suara sepanjang (...)

1421.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:51]

Oke.

1422.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD FATONI [02:18:51]

Pada TPS 01 dan TPS 07 (...)

1423.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:52]

Langsung ini dipisah petitumnya. Sekarang petitumnya dulu, yang ini bagaimana?

1424.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD FATONI [02:18:58]

Lanjut ke Petitum.

Dalam provisi yang pertama adalah mengabulkan provisi Pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 01 dan TPS 07, Kelurahan Bilabong Jaya, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bandar Lampung, Daerah Pemilihan Bandar Lampung 3.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum 360 Tahun 2024 tentang Pernetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan seterusnya, sepanjang daerah pemilihan Bandar Lampung 3 untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Bandar Lampung.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bandar Lampung di Daerah Pemilihan Bandar Lampung 3, yaitu yang pertama, Nomor Urut 1 PKS yaitu 16.440 dan nomor untuk Gerindra=16.490.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Dan/atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kemudian, pengisian Anggota DPRD Kota Metro daerah pemilihan Metro 3 akan disampaikan oleh rekan saya, Yang Mulia.

Terima kasih.

1425.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:25]

Oke. Sekarang DPRD kabu ... Kota Metro, Dapil Metro 3. Silakan!

1426.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:20:33]

Terima kasih. Izin, Yang Mulia, melanjutkan.

1427.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:34]

Ya, silakan.

1428.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:20:40]

Pengisian keanggotaan DPRD Kota Metro Daerah Pemilihan Metro 3, terkait perhitungan perolahan kursi ke-6 atau kursi terakhir terjadi akibat selisih suara antara Partai Gerindra dengan PKB. Selisih tersebut dikarenakan beberapa persoalan hukum antara lain, pemilih berasal dari wilayah lain di 6 TPS di Kelurahan Yosodadi, Kelurahan Tejosari, Kelurahan Tejo Agung.

Atas hal tersebut, Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu. Namun, karena penanganan yang lambat. Sehingga tidak dapat dilakukan PSU, sebagaimana permintaan Pemohon.

1429.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:33]

Oke, terus?

1430.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:21:37]

6 TPS yang dimaksud terjadi ... pemilih berasal dari wilayah lain tersebut, terjadi pada TPS 17, TPS 23, TPS 8, 9, 10, dan TPS 9, Kelurahan Tejo Agung.

1431.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:56]

Oke, terus?

1432.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:21:57]

Adapun di TPS 17 Kelurahan Yosodadi, terdapat 9 orang pemilih menggunakan KTP dan didaftar dalam DPK. Yang nama-namanya adalah sebagaimana tabel berikut, dianggap dibacakan, halaman 13, Yang Mulia.

1433.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22 :17]

Ya.

1434.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:22:20]

Kemudian, terjadi di TPS 23, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, sebanyak 10 orang pemilih menggunakan KTP dan didaftar dalam DPK. Dengan nama-nama sebagaimana tabel 3, dianggap dibacakan.

Kemudian TPS 8, Kelurahan Tejo Sari, sebanyak 15 orang dengan nama-nama sebagaimana berikut di bawah, dianggap dibacakan.

Kelur ... di Kelurahan Tejo Sari sebanyak 9 orang dengan nama-nama sebagai berikut, dianggap dibacakan.

Di TPS 10, Kelurahan Tejo Sari, 9 orang dengan nama-nama sebagai berikut, dianggap dibacakan.

Di TPS 9, sebanyak 8 orang dengan nama-nama (...)

1435.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:17]

Ini (...)

1436.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:23:17]

Sebagai berikut, dianggap dibacakan (...)

1437.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:19]

Sudah beda ... anunya, ya ... kelurahannya yang satunya, ya?

1438.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:23:24]

Benar, Yang Mulia.

1439.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:25]

Yang terakhir Tejo Agung, toh?

1440.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:23:27]

Tejo Agung.

1441.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:28]

Ya. Ya, terus?

1442.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:23:33]

Dilanjutkan langsung ke Petitem, Yang Mulia.

1443.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:35]

Eenggak, sudah dilaporkan ke Bawaslu?

1444.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:23:37]

Sudah dilaporkan.

1445.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:38]

Terus, gimana Bawaslu?

1446.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:23:40]

Bawaslu lambat dalam menangani laporan (...)

1447.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:42]

Sudah lewat waktu berarti?

1448.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:23:44]

Sudah lewat waktu 10 hari, Yang Mulia.

1449.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:44]

10 hari, oke. Terus, Petitemnya sekarang?

1450.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT: AHMAD FATONI [02:23:52]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam provisi.

1. Mengabulkan provisi Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan KPU RI untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 17, TPS 23, Kelurahan Yosodadi. TPS 8, 9, 10, Kelurahan Tejosari. TPS 9, Kelurahan Tejo Agung, Kota Metro Provinsi Lampung untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Metro Dapil Metro 3.

Dalam pokok Perkara.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Keputusan KPU Nomor 360 dan seterusnya, dianggap dibacakan, sepanjang Dapil Metro 3 untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Metro Provinsi Lampung.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Metro di Daerah Pemilihan Metro 3, sebagai berikut. 1. Sesuai tabel, dianggap dibacakan.
4. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih.

1451.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:18]

Ya. Terima kasih. Sekarang yang terakhir di Kabupaten Lampung Barat, Dapil Lampung Barat 2.

1452.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:25:27]

Baik. Izin melanjutkan, Yang Mulia.

1453.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:29]

Ya.

1454.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:25:31]

Terkait dengan PHPU mengenai pengisian DPRD Lampung Barat, Daerah Pemilihan Lampung Barat 2 untuk perhitungan kursi kelima atau terakhir terjadi karena selisih suara antara Gerindra dengan Golkar.

1455.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:49]

Ya.

1456.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:25:59]

Dengan tabel sebagaimana berikut, yakni menurut versi Termohon, Golkar mendapatkan suara 2.811.

1457.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:02]

Ya.

1458.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:26:03]

Menurut versi Termohon, Gerindra mendapatkan suara 2.805.

1459.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:09]

Ya. Yang benar menurut Pemohon?

1460.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:26:11]

Ada pun menurut Pemohon, Golkar adalah 2.789 dan Gerindra=2.800.

1461.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:18]

Oke. Ada selisih berapa itu?

**1462.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-
08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR
SADAT [02:26:21]**

Terdapat selisih untuk Golkar=22 dan Gerindra=5.

1463.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:25]

5, oke. Terus?

**1464.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-
08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR
SADAT [02:26:29]**

Peristiwa perbedaan selisih suara tersebut di (...)

1465.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:32]

Terjadi di mana saja? Di TPS 5 Pekon Hujung?

**1466.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-
08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR
SADAT [02:26:38]**

TPS 5 Pekon Hujung. Benar, Yang Mulia.

1467.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:40]

Ya. Terus TPS 1 Pekon Fajar Agung?

**1468.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-
08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR
SADAT [02:26:44]**

Benar, Yang Mulia.

1469.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:45]

Terus kemudian, persandingannya dua itu dipersandingkan?

1470.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:26:51]

Benar, Yang Mulia.

1471.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:52]

Ada selisih 11 suara?

1472.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:26:53]

Benar, Yang Mulia.

1473.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:54]

Oke. Terus, selain itu ada persoalan apa? Sudah kan itu persandingannya?

1474.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:27:01]

Ya.

1475.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:02]

Itu di bawahnya narasinya kan?

1476.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:27:04]

Benar, Yang Mulia.

1477.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:05]

Oke. Terus Petitumnya sekarang berarti. Suara yang benar di dalam Petitum itu permintaannya gimana itu?

1478.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:27:19]

Ya.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam provisi.

1. Mengabulkan provisi Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan KPU RI untuk.
 - a. Melakukan pemungutan suara ulang di TPS 5 Pekon Hujung, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Barat Dapil Lampung 2.
 - b. Melakukan penghitungan suara ulang di TPS 1 Pekon Fajar Agung, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Barat, Dapil Lampung Barat 2.

Dalam pokok perkara.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya dianggap dibacakan, sepanjang Daerah Pemilihan Lampung Barat 2 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Barat di Daerah Pemilihan Lampung Barat 2, yaitu Golkar sebanyak 2.789 plus hasil pemungutan suara Gerindra sebanyak 2.800 ditambah hasil pemungutan suara.
4. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Pemohon.

1479.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29:06]

Baik. Terima kasih, Prof. Enny, ada?

1480.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:29:10]

Baik. Saudara Kuasa Pemohon, ini untuk yang Dapil Bandar Lampung 3, yang pertama tadi, ya. perolehan suara di TPS 1 dan TPS 7

itu ada buktinya? Berapa itu perolehan suaranya? Di bukti apa itu untuk TPS 1 berapa? TPS 7 berapa perolehan suaranya? Belum ada bukti, ya?

1481.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD FATONI [02:29:34]

Untuk TPS 1, ada Bukti P-10, Yang Mulia.

1482.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:29:37]

Berapa perolehan suaranya? Di situ lengkap? TPS 1 berapa? TPS 7 itu berapa perolehan suaranya, masing-masing? Ada semua?

1483.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD FATONI [02:29:43]

Ada, Yang Mulia.

1484.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:29:45]

Kemudian ini Saudara minta, di sini ada PSU, ya?

1485.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD FATONI [02:29:48]

Ya.

1486.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:29:49]

Untuk dua itu, kemudian minta suara yang benar juga?

1487.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD FATONI [02:29:51]

Betul, Yang Mulia.

1488.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:29:52]

Terus ditambah hasil PSU?

1489.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD FATONI [02:29:54]

Ya.

1490.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:29:54]

DPT-nya jadi berapa itu nanti?

1491.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD FATONI [02:29:57]

DPT (...)

1492.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:29:59]

Ditambah suara yang benar, kemudian hasil ... plus PSU. Itu gimana cara menghitungnya itu?

1493.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD FATONI [02:30:06]

Jadi, itu kan kami ada permintaan provisi, Yang Mulia.

1494.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:30:10]

Ya, di luar provisi, dalam pokok perkaranya itu. Kalau provisinya kan Anda minta PSU.

1495.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD FATONI [02:30:15]

Ya, maksud (...)

1496.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:30:15]

Kemudian minta pembatalan, ya. Kemudian dibawahnya menunjukkan lagi suara yang benar, 16.440, ya?

1497.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD FATONI [02:30:22]

Ya.

1498.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:30:23]

Ditambah hasil PSU yang provisi itu.

1499.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD FATONI [02:30:25]

Betul, Yang Mulia.

1500.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:30:26]

Nah, itu kalau di total itu jadi berapa, tuh? Dilihat dari DPT-nya ada berapa? Kemudian muncul yang sebenarnya segitu untuk seluruhnya atau dua TPS itu saja?

1501.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD FATONI [02:30:35]

Untuk 2 TPS itu saja, Yang Mulia.

1502.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:30:37]

Ya, 1640 ... 16.440 plus hasil PSU. Gerindranya=16.490 plus hasil PSU, kan begitu?

1503.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD FATONI [02:30:45]

Ya, Yang Mulia.

1504.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:30:45]

Nah itu, 16 ... 4.000 satu TPS atau dua TPS itu?

1505.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD FATONI [02:30:49]

TPS 1 dan TPS 7, Yang Mulia.

1506.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:30:52]

Nah, ini gimana membaginya ini? Ada buktinya ... buktinya, bukti apa yang bisa menunjukkan kemudian suara yang sebenarnya seperti itu?

1507.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD FATONI [02:30:59]

Rencananya kami ada daftar tambahan bukti kalau diizinkan, Yang Mulia.

1508.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:31:03]

Kemudian yang di dalil berikutnya, di Metro 3, ya, itu 6 TPS. Itu perolehan suara masing-masing dari TPS itu berapa? Ada bukti untuk itu?

1509.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD FATONI [02:31:16]

Sudah dilengkapi di daftar bukti, Yang Mulia.

1510.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:31:19]

Daftar buktinya apa yang dipakai?

1511.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AHMAD FATONI [02:31:22]

Total kita sudah menyerahkan Metro 3 (...)

1512.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:31:25]

Pakai bukti apa itu, Saudara ajukan?

1513.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:31:30]

Izin, formulir C.Hasil salinan KPU, daftar hadir DPK.

1514.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:31:38]

Oke. Kemudian yang Saudara minta di sini PSU,ya?

1515.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:31:39]

PSU benar, Yang Mulia.

1516.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:31:47]

Kemudian ada penetapan suara yang benar juga?

1517.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:31:49]

Benar, betul, Yang Mulia.

1518.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:31:50]

Belum PSU sudah ada penetapan suara yang benar berarti, ya?

1519.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:31:53]

Betul, Yang Mulia.

1520.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:31:53]

Ditambah hasil PSU-nya. Nah itu, cara menghitungnya seperti apa, kemudian supaya dapat seperti itu harus dicek, itu. DPT-nya Berapa jadinya? Ada suara yang benar plus hasil PSU ditambah lagi di situ. Ya, tolong itu dibuktikan, ya.

1521.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:32:06]

Baik, Yang Mulia.

1522.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH[02:32:07]

Kemudian yang Dapil Lampung Barat 2. Ya, Lampung Barat 2 juga sama ini, ya. Lampung Barat 2 juga sama, Anda minta ada kemudian selisih 11 itu Anda minta PSU, toh?

1523.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:32:20]

Benar.

1524.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH[02:32:21]

Untuk TPS 5 dan TPS 1, ya. Itu juga sama kasusnya. Tetapi sudah menetapkan suara yang benarnya 2.789 untuk Golkar plus hasil PSU dan Gerindra=2.800 plus hasil PSU, ya?

1525.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:32:34]

Benar, Yang Mulia.

1526.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH[02:32:35]

Nah, itu juga perlu bukti itu, ya. Apa yang bisa Anda buktikan di sini? Karena tidak ada bukti yang menunjukkan soal ini.

1527.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:32:40]

Baik, nanti kami akan tambahkan bukti, Yang Mulia.

1528.HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH[02:32:44]

Ya, itu saya kira nanti tolong direspons, ya, KPU Bawaslu, ya, yang lengkap, ya. Termasuk Pihak Terkait, ya. Jadi semua bukti-bukti sangat penting sekali. Ya, bukti-bukti itu tidak harus saksi, apalagi ahli, tetapi dokumen tertulis yang menunjukkan soal itu, ya.
Terima kasih.

1529.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:33:03]

Ya, Prof. Anwar? Cukup. Baik.

Ini saya terakhir untuk mengesahkan bukti, alat bukti. Untuk bukti Dapil Kota Bandar Lampung 3, P-1BL III sampai dengan P-16BL III, betul?

1530.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:33:23]

Betul, Yang Mulia.

1531.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:33:24]

Kemudian untuk Kota Metro 3, P-1MT III sampai dengan P-20MT III.

1532.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:33:34]

Benar, Yang Mulia.

1533.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:33:36]

Kemudian untuk ke Lampung Barat 2, P-1LB II sampai dengan P-31LB II. Betul?

1534.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:33:45]

Benar ... benar, Yang Mulia.

1535.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:33:46]

Betul. Ada beberapa catatan nanti tolong dianu, ya.

1536.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:33:50]

Baik.

1537.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:33:51]

Dianukan di bawah, ketemu sama Panitera Penggantinya.

1538.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:33:53]

Baik, Yang Mulia.

1539.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:33:54]

Karena ini misalnya bukti fisik berupa flashdisk, rekaman panggilan suara, kemudian tidak ada legesnya, terus kemudian banyak catatan, ada tujuh catatan nanti diklarifikasi dan dibetulkan, ya.

1540.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:34:12]

Baik, Yang Mulia.

1541.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:12]

Baik. Semuanya disahkan dengan catatan.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang mau disampaikan? Pemohon cukup, ya?

1542.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT [02:34:26]

Cukup, Yang Mulia.

1543.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:34:26]

Baik. Sekarang Perkara Nomor 186, Partai Garda Republik Indonesia. Ya? Apa? Oke, silakan. Surat Kuasa Tambahan diserahkan. Silakan bawa ke sini.

Ya, Perkara 186.

1544.PEMOHON PERKARA NOMOR 186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULHAIDIR [02:34:29]

Terima kasih, Yang Mulia.

1545.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:34:31]

Sebentar. Ini permohonan partai atau permohonan perorangan ini?

1546. PEMOHON PERKARA NOMOR 186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULHAIDIR [02:34:35]

Partai politik.

1547. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:34:37]

Partai politik?

1548. PEMOHON PERKARA NOMOR 186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULHAIDIR [02:34:37]

Ya, Mulia.

1549. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:34:38]

Ini Pemohon Ahmad Ridha Sabana, ini siapa ini?

1550. PEMOHON PERKARA NOMOR 186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULHAIDIR [02:34:42]

Ketu ... ketua.

1551. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:34:43]

Ketumnya?

1552. PEMOHON PERKARA NOMOR 186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULHAIDIR [02:34:44]

Ya.

1553. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:34:46]

Ketum partai?

1554. PEMOHON PERKARA NOMOR 186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULHAIDIR [02:34:47]

Garuda.

1555. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:34:49]

Garuda. Oh, catatannya kok bisa begini, ketum?
Baik. Kemudian Yohana Murtika?

1556. PEMOHON PERKARA NOMOR 186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULHAIDIR [02:34:56]

Sekjen, Yang Mulia.

1557.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:34:57]

Sekjen, oke. Kuasa Hukumnya Abdul Haris?

1558.PEMOHON PERKARA NOMOR 186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULHAIDIR [02:36:02]

Abdul Haris dan (...)

1559.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:03]

Dan Yustian Dewi Widiastuti?

1560.PEMOHON PERKARA NOMOR 186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULHAIDIR [02:36:06]

Ya.

1561.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:07]

Yang nyampaikan siapa ini?

1562.PEMOHON PERKARA NOMOR 186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULHAIDIR [02:36:09]

Mewakil Pemohon ket ... ketum dengan sekjen.

1563.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:13]

Bukan advokat?

1564.PEMOHON PERKARA NOMOR 186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULHAIDIR [02:36:15]

Bukan.

1565.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:16]

Oke, kalau bukan advokat boleh pakai pakaian biasa. Tapi kalau advokat harus menggunakan toga, ya.

1566. PEMOHON PERKARA NOMOR 186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULHAIDIR [02:36:22]

Ya.

1567. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:22]

Jadi bukan advokat, ya?

1568. PEMOHON PERKARA NOMOR 186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULHAIDIR [02:36:23]

Bukan, Yang Mulia.

1569. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:24]

Oke. Silakan.

1570. PEMOHON PERKARA NOMOR 186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 PERKARA: ZULHAIDIR [02:36:27]

Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum Wr. Wb.

1571. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:34]

Ini sebetulnya, sebentar, Partai Garda Perubahan Indonesia atau Partai Garuda Republik Indonesia?

1572. PEMOHON PERKARA NOMOR 186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULHAIDIR [02:36:41]

Garda Republik Indonesia.

1573. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:42]

Garda?

1574. PEMOHON PERKARA NOMOR 186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULHAIDIR [02:36:44]

Republik Indonesia atau disingkat Garuda, Yang Mulia.

1575.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:49]

Partai Garuda?

1576.PEMOHON PERKARA NOMOR 186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULHAIDIR [02:36:50]

Ya.

1577.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:50]

Oke, ya.

1578.PEMOHON PERKARA NOMOR 186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULHAIDIR [02:36:51]

Kami mewakili (...)

1579.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:53]

Ini partai, Partai Garuda, ya?

1580.PEMOHON PERKARA NOMOR 186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULHAIDIR [02:36:55]

Ya, Yang Mulia.

1581.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:56]

Oke, ya. Silakan.

1582.PEMOHON PERKARA NOMOR 186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULHAIDIR [02:36:58]

Kami mewakili Pemohon Ketua Umum dan Sekjen Partai Garuda Republik Indonesia atau Partai Garuda, Yang Mulia.

1583.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:08]

Ya.

1584. PEMOHON PERKARA NOMOR 186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULHAIDIR [02:37:12]

Mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, perihal perselisihan hasil pemilihan umum. Terkait dengan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Selanjutnya dianggap dibacakan.

Permo ... Kedudukan ... Permohonan (...)

1585. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:52]

Mahkamah berwenang?

1586. PEMOHON PERKARA NOMOR 186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULHAIDIR [02:37:54]

Mahkamah berwenang. Permohonan kami juga masih dalam tenggang waktu (...)

1587. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:37:57]

Tenggang waktu.

1588. PEMOHON PERKARA NOMOR 186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULHAIDIR [02:37:58]

Hari Sabtu, 23 Maret 2024, pukul 15.17 WIB.

1589. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:04]

Oke. Kedudukan hukum?

1590. PEMOHON PERKARA NOMOR 186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULHAIDIR [02:38:07]

Partai Politik Nomor Urut 11.

1591. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:09]

Partai Politik Nomor 11. Berarti punya kedudukan hukum, ya?

1592.PEMOHON PERKARA NOMOR 186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULHAIDIR [02:38:13]

Ya.

1593.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:15]

Oke. Terus yang dipersoalkan apa ini?

1594.PEMOHON PERKARA NOMOR 186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULHAIDIR [02:38:18]

Pokok permohonan (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:20]

Di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan?

1595.PEMOHON PERKARA NOMOR 186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULHAIDIR [02:38:22]

Ya. Dapil 7, Yang Mulia.

1596.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:24]

Dapil 7, ya. Terus gimana itu apa yang dimaksud? Ada masalah apa?

1597.PEMOHON PERKARA NOMOR 186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULHAIDIR [02:38:31]

Bahwa, pada sa ... bahwa pada saat rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Lampung Selatan. Pemohon meminta untuk diberikan Berita Acara Kejadian Khusus, akan tetapi Termohon tidak memberikan Berita Acara Kejadian Khusus, dan Pemohon tidak menandatangani Berita D.Hasil Kabupaten Dapil 7 Kabupaten Lampung Selatan. Dengan Bukti P-4.

1598.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:57]

Jadi, Pemohon enggak tanda tangan di Berita Acara, ya?

1599. PEMOHON PERKARA NOMOR 186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULHAIDIR [02:38:59]

Tidak, Yang Mulia.

1600. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:39:00]

Tidak tanda tangan, ya. Terus?

1601. PEMOHON PERKARA NOMOR 186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULHAIDIR [02:39:03]

Dalam rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara Tingkat Kecamatan Katibung. Pemohon beserta 6 partai politik menolak hasil rekapitulasi tingkat kecamatan. Untuk perolehan suara DPRD Kabupaten dengan alasan kejadian beberapa TPS Di Desa Sidomekar, Desa Karya Tunggal, Desa Babatan, Desa Rangai Tri Tunggal, dan Desa Pardasuka, Kecamatan Katibung. Bahwa pada Dapil 7, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, telah terjadi pelanggaran administrasi pemilu. Tata cara pemungutan, penghitungan suara dan pemilihan umum di 5 TPS.

Satu, TPS 23 Rangai Tri Tunggal, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. P-5 perolehan suara Termohon dianggap dibacakan.

1602. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:39:55]

Ya.

1603. PEMOHON PERKARA NOMOR 186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULHAIDIR [02:39:56]

Perolehan suara Pemohon dianggap dibacakan.

Bahwa ada pemilih di luar Dapil 7 yang menggunakan hak pilih pada suara DPRD Kabupaten atas nama Reisa Dyasvaro Zulanda Putri yang tercantum dalam daftar pemilih khusus P-6 dengan menggunakan KTP beralamatkan Kecamatan Jati Agung P-7. Sedangkan yang bersangkutan di luar dapil dan tidak mempunyai hak untuk memilih di Dapil 7, tidak terdaftar dalam DPT TPS 23 Rangai Tri Tunggal maupun DTTB TPS 23 Rangai.

Nomor 2. TPS 13 Desa Pardasuka, Kecamatan Katibung (P-9). Perolehan suara Termohon ... Perolehan suara Pemohon, dianggap dibacakan.

Bahwa ada dalam daftar pemilih khusus TPS 13 Pardasuka (P-10) yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) atau KTP yang masih dalam

berbentuk kertas, yang sudah tidak berlaku lagi, atas nama Juheti (P-11). Yang bersangkutan tidak terdaftar dari ... dalam DPT maupun DPTb TPS 13 Desa Pardasuka.

Selanjutnya TPS 1 Sidomekar, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon, dianggap dibacakan.

Bahwa terjadi penghitungan suara ulang pada Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Katibung TPS 1 sampai TPS 10 Desa Sidomekar yang dituangkan dalam Form D.Hasil Kecamatan DPRD kab/ko (P-14), ditemukan penggelembungan atau pemindahan suara ke nomor ... ke Nomor 7 Caleg PKB, Dapil 7, Kabupaten Lampung Selatan.

Bahwa pada TPS 1 Sidomekar, Kecamatan Katibung, telah ditemukan banyak pada C.Daftar Hadir, pola, dan bentuk, serta tarikan tanda tangan yang sama.

Bahwa pada TPS 1 Desa Sidomekar, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, ditemukan pemalsuan tanda tangan C.Daftar Hadir yang dibuktikan dengan tidak sesuai dengan tanda tangan e-KTP atas nama Khodijah (P-16). P ... TPS 2 Desa Sidomekar, Kecamatan Katibung, perolehan suara menurut Termohon, perolehan suara menurut Pemohon, dianggap dibacakan.

1604.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:51]

Ya.

1605.PEMOHON PERKARA NOMOR 186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULHAIDIR [02:42:53]

Bahwa terjadi penghitungan suara ulang rekapitulasi pada TPS 1, dianggap dibacakan. Dan ditemukan penggelembungan atau pemindahan suara Nomor 7, Ismail, dari Partai Kebangkitan Bangsa, Dapil 7.

Bahwa TPS 2 Sidomekar, Kecamatan Katibung, ditemukan banyak C.Daftar Hadir, pola, dan bentuk, serta tarikan tanda tangan yang sama (P-18).

Bahwa pada TPS 2 Desa Sidomekar, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan, ditemukan pemalsuan tanda tangan pada C.Daftar Hadir yang dibuktikan ... yang dibuktikan dengan tidak sesuai tanda tangan pada e-KTP atas nama Sarmunah, Samudi, Rohana, Sukiyati, Hasuroh, Mis'ah, ser ... serta Dahlia, Hayumi, Jamhari, dan Main (P-19 dan P-20).

Selanjutnya, TPS 5 Desa Sidomekar, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan. Perolehan suara menurut Termohon, Pemohon, dianggap dibacakan.

Bahwa terjadi penghitungan suara ulang pada Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Katibung TPS 1 sampai TPS 10 Sidomekar, yang dituangkan dalam Form D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten (P-14), ditemukan penggelembungan suara ke Calon Nomor 7 atas nama Ismail dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Dapil 7, Kabupaten Lampung Selatan.

Bahwa pada TPS 5 Sidomekar, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan, ditemukan banyak C.Daftar Hadir, pola, dan bentuk, serta tarikan tanda tangan yang sama.

Bahwa pada TPS 5 Desa Sidomekar, Lampung Selatan, ditemukan pemalsuan tanda dengan ... tanda tangan pada C.Daftar Hadir yang dibuktikan dengan ketidaksesuaian tanda tangan pada e-KTP atas nama Siti Halimah Wati (P-23), atas nama Riki Maryanto (P-24).

Bahwa Siti Halimah Wati menyatakan secara tertulis bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 hari pemungutan dan penghitungan suara berada di Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Tangerang, Banten (P-25).

Bahwa Pemohon telah melaporkan pelanggaran administrasi pemilu pada 5 TPS di atas (...)

1606.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:21]

Itu di halaman berapa itu?

1607.PEMOHON PERKARA NOMOR 186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULHAIDIR [02:45:25]

Ya, Yang Mulia?

1608.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:26]

Halaman berapa? Halaman 12?

1609.PEMOHON PERKARA NOMOR 186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULHAIDIR [02:45:27]

Halaman 12, Yang Mulia.

1610.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:29]

Oke.

1611. PEMOHON PERKARA NOMOR 186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULHAIDIR [02:45:31]

Bahwa Pemohon telah melaporkan pelanggaran administrasi pemilu pada tang ... pada 5 TPS di atas, tanggal 23 Februari 2024, 9 hari pascapemungutan dan penghitungan suara di TPS (P-26).

Bahwa Panwaslu Kecamatan Katibung, Lampung Selatan, menerima laporan Pemohon. Berdasarkan laporan Pemohon Panwaslu Kecamatan Katibung, Lampung Selatan, terjadi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan pelanggaran administrasi pemilu tata cara pemungutan dan penghitungan suara dan meminta Termohon untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut (P-28).

Berdasarkan suara ... surat rekomendasi Panwaslu Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Termohon menindaklanjuti pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan proses pemanggilan badan ad ... ad hoc untuk dilakukan verifikasi dan klarifikasi. Dan terkait dengan pelanggaran, tata cara, prosedur, mekanisme pemungutan dan penghitungan suara Termohon (...)

1612. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:29]

Itu Bukti P-29.
Sekarang Petitemnya.

1613. PEMOHON PERKARA NOMOR 186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULHAIDIR [02:46:35]

Petitem. Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (...)

1614. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:44]

Kok yang dibacakan sama yang di Permohonannya, kok beda ini?

1615. PEMOHON PERKARA NOMOR 186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULHAIDIR [02:46:52]

Sama, Yang Mulia. Itu yang di halaman 12 paling bawah (...)

1616. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:57]

Halaman 12, kan?

1617.PEMOHON PERKARA NOMOR 186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULHAIDIR [02:45:58]

Ya, yang paling bawah (...)

1618.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:59]

Apa itu?

1619.PEMOHON PERKARA NOMOR 186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULHAIDIR [02:47:00]

Majelis.

1620.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:01]

Coba, dibaca.

1621.PEMOHON PERKARA NOMOR 186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULHAIDIR [02:47:03]

Pemohon ... Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili sengketa Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Selatan untuk memutuskan sebagai berikut.

1622.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:15]

Ya.

1623.PEMOHON PERKARA NOMOR 186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULHAIDIR [02:48:17]

Satu, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Dua, membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 (...)

1624.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:24]

Dan seterusnya.

1625.PEMOHON PERKARA NOMOR 186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULHAIDIR [02:48:25]

Tahun 2024, dan seterusnya dianggap dibacakan.

1626.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:26]

Dan seterusnya, ya.

1627.PEMOHON PERKARA NOMOR 186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULHAIDIR [02:48:27]

Tiga, membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 897 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024.

Empat, memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 23 Desa Rangai Tri Tunggal, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan. TPS 13 Desa Pardasuka, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan TPS 1, 2, dan 5 Desa Sidomekar, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan.

1628.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:40]

Oke.

1629.PEMOHON PERKARA NOMOR 186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULHAIDIR [02:48:41]

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon keputusan seadil-adilnya.

Terima kasih.

1630.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:46]

Baik, itu sudah cukup jelas, ya. Tapi ada beberapa catatan ini. Ini catatannya yang pertama, ada catatan bahwa pemohon ... Posita Permohonan tidak sesuai dengan Pasal 11 angka 2 huruf b angka 4 PMK. Alat bukti telah sesuai berdasarkan itu. Petitemnya, coba dianukan ... Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 PMK 2/2003. Ada beberapa catatan itu.

Prof. Enny, ada? Cukup, ya? Ya, sama, kan?

Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-30?

1631.PEMOHON PERKARA NOMOR 186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULHAIDIR [02:48:59]

Ya, Yang Mulia.

1632.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:49:02]

Ya, semua telah diverifikasi, lengkap, disahkan.

KETUK PALU 1X

Ya, ada lagi yang akan disampaikan?

1633.PEMOHON PERKARA NOMOR 186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZULHAIDIR [02:49:08]

Cukup, Yang Mulia.

1634.KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, ya? Baik, terima kasih.

Yang terakhir, Perkara 209 dari Partai Persatuan Pembangunan. Silakan!

1635.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 209-01-17-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [02:49:39]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

1636.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:49:41]

Walaikumsalam wr. wb.

1637.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 209-01-17-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [02:49:43]

Salam sejahtera untuk kita semua. Izin, Yang Mulia, saya Bakas Manyata, S.H., M.Kn., selaku Kuasa Hukum dari Pemohon Partai Persatuan Pembangunan.

1638.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:50:00]

Ya.

1639.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 209-01-17-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [02:50:01]

Kami dari Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Persatuan Pembangunan.

1640.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:50:04]

Ya, terus.

1641.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 209-01-17-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [02:50:13]

Permohonan kami, kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perihal Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, dan seterusnya dianggap dibacakan.

1642.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:50:19]

Oke.

1643.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 209-01-17-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [02:50:23]

Sepanjang hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Lampung 1 dan Lampung 2 Provinsi Lampung. Konversi PT 4%.

1644.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:50:36]

Oke. Mahkamah berwenang?

1645.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 209-01-17-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [02:50:34]

Untuk ... Kewenangan Mahkamah, berwenang, Yang Mulia.

1646.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:50:37]

Untuk tenggang waktu, masih tenggang waktu?

1647.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 209-01-17-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [02:50:39]

Untuk tenggang waktu, kami mengajukan Permohonan di hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 19.51 WIB.

1648.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:50:38]

51, ya, oke.
Pemohon memiliki Kedudukan Hukum.

1649.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 209-01-17-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [02:50:49]

Untuk Kedudukan Hukum. Bahwa Partai Persatuan Pembangunan memang sah sebagai Partai Peserta Pemilu Nomor Urut 17.

1650.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:51:01]

Oke, Positanya sekarang.

1651.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 209-01-17-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [02:51:01]

Baik, Yang Mulia. Karena kami yang terakhir, jadi kami langsung ke ... izin, ke tabel Nomor 2, Yang Mulia. Karena kebetulan isi Posita 14, 15 sama seperti yang PPP tadi di Sulteng dan Jambi.

1652.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:51:22]

Ya, ini ... kalau ini di Lampung 1, Lampung 2, ya?

1653.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 209-01-17-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [02:51:24]

Siap.

1654.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:51:26]

Oke, gimana?

1655.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 209-01-17-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [02:51:27]

Jadi, di tabel 2 ini, Yang Mulia, untuk Lampung 1 kami jelaskan. Bahwa perolehan suara PPP, itu versi Pemohon ... versi Termohon, PPP mendapatkan suara 54.498 suara.

1656.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:51:49]

Oke.

1657.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 209-01-17-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [02:51:50]

Sedangkan versi Pemohon, Pemohon harusnya mendapatkan 61.513 suara.

1658.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:51:49]

Oke.

1659.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 209-01-17-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [02:51:50]

Sedangkan perolehan suara Partai Garuda versi Termohon, Garuda mendapatkan 7.161 suara. Sedangkan versi Pemohon, Partai Garuda seharusnya mendapatkan 146 suara.

1660.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:52:02]

Oke.

1661.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 209-01-17-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [02:52:06]

Jadi ada selisih 7.015 suara, Yang Mulia.

1662.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:52:09]

Ya, yang kedua sekarang Lampung 2.

1663.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 209-01-17-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [02:52:21]

Lalu untuk di Lampung 2. Perolehan suara PPP versi Termohon, yaitu 14.551 suara. Sedangkan versi kami, yaitu sebesar 21.206 suara.

1664. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:52:09]

Ya.

1665.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 209-01-17-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [02:52:30]

Lalu untuk Partai Garuda di Lampung 2. Versi Termohon, Garuda mendapatkan 6.860 suara. Sedangkan versi kami, Garuda harusnya mendapatkan 205 suara.

1666.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:52:46]

Kenapa bisa begitu?

1667.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 209-01-17-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [02:52:48]

Karena terjadi kesalahan, Yang Mulia. Ada kesalahan input dan terjadi praktik pemindahan yang cukup masif, Yang Mulia. Karena di bukti yang kami kumpulkan ini, memang belum kami tuangkan di sini, tetapi akan kami masukkan di daftar bukti tambahan. Untuk di Lampung 1 itu, praktik pemindahan itu melibatkan 1.000 ... sekitar 1.700 TPS, Yang Mulia.

1668.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:53:08]

Ya.

1669.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 209-01-17-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [02:53:12]

Lalu untuk di Lampung 2, itu sekitar 950 TPS, Yang Mulia.

1670.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:53:32]

Ya.

1671.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 209-01-17-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [02:53:37]

Baik. Kami langsung ke Petitem, Yang Mulia.

1672.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:53:35]

Silakan baca.

1673.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 209-01-17-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [02:53:32]

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, dan seterusnya dianggap dibacakan, sepanjang hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Lampung 1 dan Lampung 2, Provinsi Lampung. Konversi 4%, PT 4%.

1674.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:54:10]

Baik.

1675.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 209-01-17-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [02:54:15]

3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda yang benar untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Lampung 1 dan Lampung 2, Provinsi Lampung sebagai berikut.
 - 1) Di Lampung 1, perolehan suara yang benar Partai Persatuan Pembangunan=61.513 suara, sedangkan Partai Garuda=146 suara.
 - 2) Di Lampung 2, perolehan Partai Persatuan Pembangunan=21.206 suara, sedangkan Partai Garuda=205 suara.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya.
Hormat kami, Kuasa Hukum.

1676.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:55:09]

Baik. Terima kasih.
Prof. Enny, ada? Cukup, ya. Prof. Anwar? Cukup, ya. Ini cukup.
Saudara hanya mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-2?

1677.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 209-01-17-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [02:55:32]

Ya, ketika pas mengajukan Permohonan, Yang Mulia.

1678.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:55:32]

Ya. Ada bukti tambahan?

1679.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 209-01-17-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [02:55:32]

Ada, Yang Mulia.

1680.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:55:32]

Kapan mau diserahkan? Ini ada waktu setengah jam, ini kan sudah selesai. Ada waktu sampai terakhir 17.00 WIB.

1681.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 209-01-17-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [02:55:32]

Siap, Yang Mulia.

1682.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:55:32]

Ya.

1683.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 209-01-17-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [02:55:32]

Siap.

1684.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:55:39]

Baik. Yang disahkan Bukti P-1 dan P-2.

KETUK PALU 1X

Yang Bukti P-3 belum disahkan karena mau ditambahkan, ya, kan?

1685.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 209-01-17-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAKAS MANYATA [02:55:43]

Siap, Yang Mulia.

1686.KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:55:43]

Baik. Ini saya sampaikan penundaan sidangnya, ya, dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta pengesahan alat bukti dari Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, dan tambahan alat bukti dari Para Pemohon yang akan diserahkan paling lambat pukul 17.00 WIB, ya, bagi semua Pemohon saja. Penundaannya untuk Perkara 170, 166, 173, 98, 104, 215, 186, 209, sidang ditunda Selasa, 14 Mei 2024, pada pukul 13.30 WIB, agendanya tadi sudah saya sebutkan.

Kemudian Perkara 73, 67, dan Perkara 100[sic!] ditunda Senin, 13 Mei 2024, pada pukul 19.00 WIB, dengan agenda yang sama.

Dari Pemohon, ada yang akan disampaikan? Sudah cukup? Cukup, ya.

Termohon? KPU? Cukup.

Bawaslu, cukup? Ya.

Pihak Terkait semua, ada yang akan disampaikan? Cukup, ya.

Baik. Kalau begitu, sidang selesai dan tutup. Terima kasih.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.34 WIB

Jakarta, 3 Mei 2024

Plt. Panitera,

Muhidin

